

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA
DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA
SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh
ASA'DUN'NISA'
NIM: G71218032



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Asa'Dun'Nisa', G71218032 menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 28 Desember 2022



Asa'Dun'Nisa'

G71218032

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

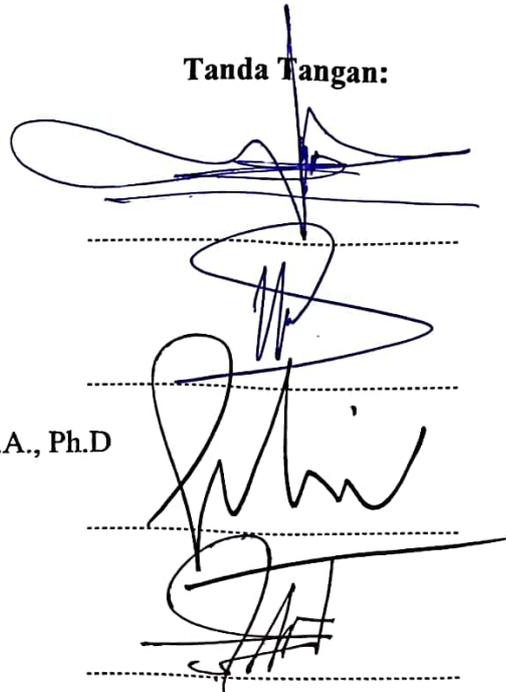
Oleh
Asa'Dun'Nisa'
NIM: G71218032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 28 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Mustofa. S.Ag., M.E.I
NIP. 197710302008011007
(Penguji 1)
2. Hj. Nurlailah, S.E, M.M.
NIP. 196205222000032001
(Penguji 2)
3. Achmad Room Fitrianto, S.EI, M.E.I.,M.A., Ph.D
NIP. 197706272003121002
(Penguji 3)
4. Abdullah Kafabih,S.EI, M.SE.
NIP. 199108072019031006
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya 28 Desember 2022
Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asa'Dun'Nisa'
NIM : G71218032
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail address : ninisnisa299@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PENYERAPAN

TENAGA KERJA DI KOTA SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2023

Penulis



(Asa'Dun'Nisa')
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Program Kartu Prakerja merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan dengan memberikan bantuan keuangan kepada pencari kerja, pekerja yang dirumahkan, atau pekerja yang perlu meningkatkan kompetensi kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Sektor Ekonomi Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang Program Kartu Prakerja. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut untuk memberikan perlindungan sosial dalam upaya memulihkan perekonomian nasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau masalah dari apa yang diteliti. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasilnya, metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan untuk membuat gambaran fenomena yang ada yang tidak berdasarkan perhitungan statistik atau angka, melainkan pada naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dari kantor pusat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ekonomi (PPID Kemenko), BPS, dan dokumen lainnya.

Berdasarkan pada hasil penelitian di simpulkan bahwa efektivitas program kartu prakerja dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya pada masa Pandemi Covid-19 kurang efektif karena tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan pada kemampuan peserta program dalam mencari pekerjaan. Saran dalam penelitian ini adalah bahwa selama tahap pelatihan, praktik tatap muka dan praktik langsung harus dilakukan sehingga benar-benar menambah kompetensi penerima, dan Kementerian Ketenagakerjaan harus bekerja sama dengan dunia kerja sehingga setelah lulus program kartu pra-kerja dapat langsung diserap di dunia kerja.

Kata Kunci: Kartu Prakerja, Efektivitas, penyerapan Tenaga Kerja.

ABSTRACT

The Pre-Employment Card Program is a program with the aim of developing work competencies and entrepreneurship with assistance in the form of fees aimed at job seekers, workers who have been laid off, or workers who need to improve their work competencies, including micro and small business actors. The policies governing the Pre-Employment Card Program are Presidential Decree No. 76 of 2020 and Economic Affairs No. 11 of 2020. These policies are used by the government to provide social protection in an effort to restore the national economy.

The type of research used in this study is a type of descriptive research that aims to be able to describe a problem phenomenon from what is being studied. The method used in this study is a qualitative research method. So, the type of research used in this research is descriptive qualitative. The study was conducted to create an overview of existing phenomena not based on statistical calculations or numbers but derived from interview scripts, field notes, documentation from the central office Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Ekonomi (PPID Kemenko), BPS and also other documents.

Based on the results of the study, it was concluded that the effectiveness of the pre-employment card program in Employment Absorption in the City of Surabaya during the Covid-19 Pandemic was less effective because it did not bring many changes to program participants in getting jobs. Suggestions in this study should be in the training phase to be carried out face-to-face and direct practice so that it really adds to the competence of the recipient, and the Ministry of Manpower should cooperate with the world of work so that after training graduates on the pre-employment card program can be directly absorbed in the world of work.

Keywords: Pre-Employment Card, Effectiveness, Labor absorption.

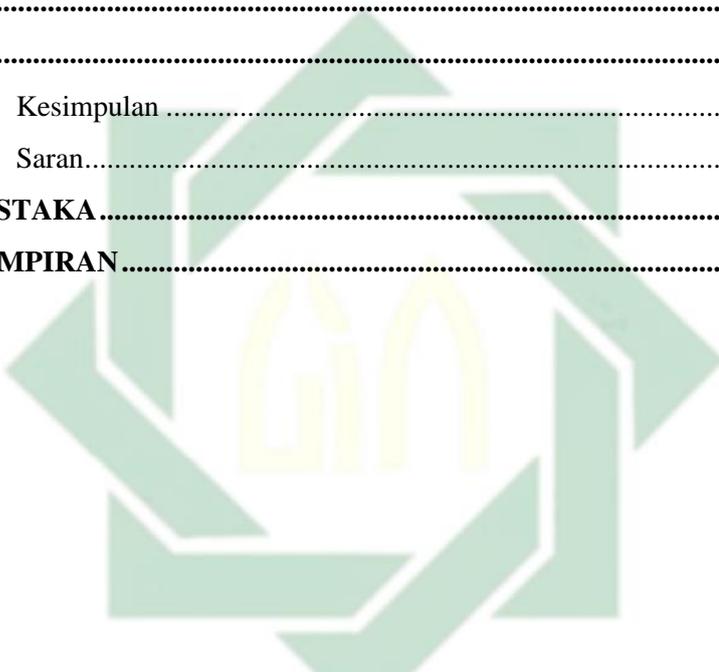
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Kajian Pustaka.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Hasil Penelitian	17
1.7 Definisi Operasional.....	18
1.8 Metode Penelitian.....	21
1.9 Sistematika Pembahasan	27
BAB II.....	29
KERANGKA TEORITIS.....	29
2.1 Tenaga Kerja	29
2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja	29
2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja.....	31
2.1.3 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja.....	33
2.1.4 Angkatan Kerja	35
2.2 Pengangguran.....	36
2.2.1 Jenis-Jenis Pengangguran.....	37
2.2.2 Faktor Penyebab Pengangguran	38
2.2.3 Dampak Pengangguran	39

2.3	Pandemi Covid-19.....	39
2.3.1	Dampak Covid-19	41
2.3.2	Upaya Pemerintah	44
2.4	Kebijakan Publik.....	45
2.5	Efektivitas Program Kartu Pra-Kerja	47
2.5.1	Pengertian Efektivitas	47
2.5.2	Pengertian Kartu Pra-Kerja	48
2.5.3	Tujuan Program Kartu Pra-Kerja	51
2.5.4	Manfaat Program Kartu Prakerja	51
2.5.5	Syarat Program Kartu Pra-Kerja	52
2.5.6	Tahapan Program Kartu Pra-Kerja.....	53
2.6	Pelatihan.....	53
2.7	Kerangka Konseptual	55
BAB III	57
METODE PENELITIAN	57
3.1	Jenis Penelitian.....	57
3.2	Tempat atau Lokasi Penelitian	58
3.3	Sumber Data.....	58
3.4	Teknik Pengumpulan Data	59
3.5	Teknik Analisis Data	65
BAB IV	68
GAMBARAN UMUM DAN DATA PENELITIAN	68
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
4.1.1	Letak Geografis Kota Surabaya	68
4.1.2	Letak Demografis.....	71
4.2	Realisasi Program Kartu Prakerja	75
4.2.1	Awal Terbentuk Program Kartu Pra-Kerja	75
4.2.2	Tujuan Kartu Prakerja	77
4.2.3	Syarat Kartu Prakerja	77
4.2.4	Tahapan Kartu Prakerja.....	78
4.2.5	Manfaat Kartu Prakerja	79
4.3	Program Kartu Prakerja di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi.....	80

4.4 Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi COVID-19.....	98
BAB V	104
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	104
5.1 Program Kartu Pra-Kerja Di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi COVID-19	104
5.2 Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi COVID-19.....	112
BAB VI.....	117
PENUTUP.....	117
6.1 Kesimpulan	117
6.2 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
DAFTAR LAMPIRAN.....	125



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

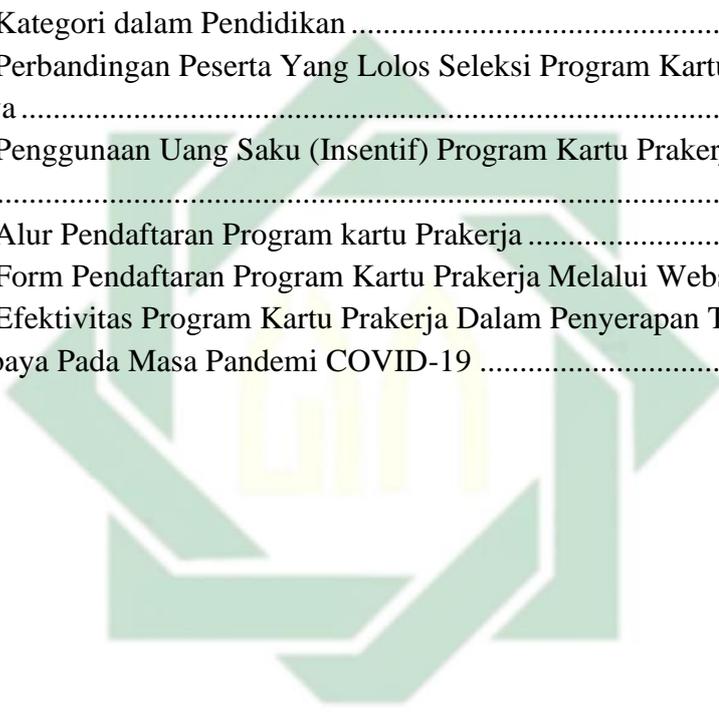
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Surabaya, 2021	7
Tabel 1. 1.2 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	8
Tabel 1.3 Kajian Pustaka.....	12
Tabel 4. 1 Jumlah Kecamatan di Kota Surabaya	70
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Surabaya	72
Tabel 4. 3 Jumlah Sekolah di Kota Surabaya	73
Tabel 4. 4 Banyaknya Industri Besar dan Sedang.....	74
Tabel 4. 5 Tabel Identitas Masyarakat yang Pernah Mendaftar Kartu Prakerja ...	87
Tabel 4. 6 Masyarakat Sudah Lolos Kartu Prakerja Dan Juga Bentuk Penyaluran Uang Insentif Kartu.....	97
Tabel 4. 7 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Surabaya, 2019-2021	99
Tabel 4. 8 Presentase Status Pekerjaan Peserta Setelah Ikut Program Kartu Prakerja di Kota Surabaya Tahun 2022	101
Tabel 4. 9 Indikator Keefektifan Program Kartu Prakerja.....	102

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Angkatan Kerja di Kota Surabaya	6
Gambar 2. 1 Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja	31
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	56
Gambar 4. 1 Peta Kota Surabaya	68
Gambar 4. 2 Kategori Dalam Jenis Kelamin	83
Gambar 4. 3 Kategori dalam Usia.....	84
Gambar 4. 4 Kategori dalam Pendidikan	85
Gambar 4. 5 Perbandingan Peserta Yang Lolos Seleksi Program Kartu Prakerja Di Kota Surabaya	90
Gambar 4. 6 Penggunaan Uang Saku (Insentif) Program Kartu Prakerja, Februari 2022.....	95
Gambar 4. 7 Alur Pendaftaran Program kartu Prakerja	109
Gambar 4. 8 Form Pendaftaran Program Kartu Prakerja Melalui Website	111
Gambar 4. 9 Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi COVID-19	115



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran kasus Covid-19 sangat cepat dan telah menyebar secara nasional, termasuk Indonesia. Covid-19 mengakibatkan berbagai macam kondisi medis, mulai dari flu biasa hingga kondisi yang lebih serius seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERSCoV) dan Sindrom Pernafasan akut parah (SARSCoV). Covid-19 merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia pada tahun. Penyebaran Covid-19 sangat cepat, termasuk di luar negeri. Hingga saat ini, Covid-19 telah teridentifikasi di 188 negara. (Junaedi; Salistia, 2020)

Wabah Covid-19 yang menyebar dengan ganasnya ke belahan dunia hingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian global, dan juga termasuk perekonomian Indonesia. Bahkan banyak negara yang melakukan pencegahan atau menekan potensi penularan dari banyak negara yang telah mengalami ombak pandemi ini. Maka dari itu tindakan pencegahan seperti karantina, isolasi wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar (SSR) yang sedang dilakukan mengakibatkan beberapa penerbangan telah ditangguhkan di beberapa negara. Transportasi darat dan laut juga dibatasi, dan lagi banyak industri lain yang turut menghentikan produksinya. Sejumlah penerbangan diberhentikan di berbagai negara. Transportais darat dan laut juga di batasi. Dan sejumlah industri lainnya berhenti juga memproduksi.

Bantuan dari pemerintah merupakan hal yang dapat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat, Hal ini berbentuk regulasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan serta membantu masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakatnya maka dari itu penekanan akan kebijakan yang dapat berpengaruh buruk dalam kestabilan ekonomi layaknya untuk ditemukan solusi maupun cara lain sehingga masalah pandemic tidak turut menghancurkan sektor perekonomian masyarakat Indonesia. Kartu Pra Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Program ini memberikan bantuan intensif kepada penerima manfaat berupa biaya pelatihan agar mempermudah para pencari kerja maupun pekerja yang mengalami PHK agar dapat bersaing kembali setelah keterampilan dan kemampuan mereka dikembangkan melalui insentif dan biaya pelatihan tersebut. Pengemasan kartu prakerja ini dapat bermanfaat bagi sektor swasta serta menjadi nilai tambah bagi masyarakat maka dari itu program ini merupakan wujud dari Kerjasama pihak swasta dengan pemerintah dalam menciptakan Indonesia Jaya dengan SDM unggul dalam bungkus Kerjasama Gotong royong. (Yasserina Rawie; Palupi Lindiasari Samputra, 2020)

Program Kartu Prakerja tidak hanya untuk pencari kerja, tetapi juga untuk pekerja, karyawan dan pegawai. Singkatnya, semua warga negara yang berusia 18 tahun atau lebih dan saat ini tidak terdaftar di sekolah atau perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Karena pemerintah percaya

bahwa belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia. Namun, prioritas diberikan kepada pencari kerja muda karena langkah pertama di dunia kerja akan mengarah pada langkah yang lebih cemerlang di masa depan. Merespon dampak COVID-19, untuk sementara waktu, Kartu Prakerja untuk sementara akan diprioritaskan bagi pekerja dan pelaku usaha mikro/kecil yang mata pencahariannya terdampak.

Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja yang membentuk Komite Cipta Kerja dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. Komite tersebut bertugas mengembangkan kebijakan dan mengawasi program Kartu Prakerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengetuai Komite, yang terdiri dari 6 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. Bertindak sebagai Sekretaris Komite, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, kartu ini pun resmi diluncurkan. (Kartu Prakerja, n.d.)

Kartu pra-kerja ini sendiri telah berjalan hingga tahap pendaftaran gelombang kedua dan untuk pendaftar yang telah diseleksi pada gelombang pertama telah mendapat dana yang dijanjikan sebesar Rp3.550.000, dengan rincian paket bantuan tersebut terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk empat bulan,

serta insentif survei kekerjaan dengan total Rp150.000. (Yoshua Consuello, 2020)

Pada penyaluran pencairan lancar, tetapi masih ada kendala bagi peserta yang lolos, Pencairan yang melalui rekening. Dikarenakan peserta sendiri yang kurang melengkapi persyaratan kartu prakerja, seperti mengganti nomor telepon dan juga mengganti NIK pada KTP. Selain itu penyaluran pada pencairan bagi peserta yang lolos lancar tidak ada kendala.

Program kartu pra kerja juga bertujuan untuk mengasah keterampilan masyarakat agar diprioritaskan di dunia kerja, sehingga meningkatkan peluang karir. Program kartu pra kerja tidak hanya merupakan program bantuan tunai bagi penerimanya, tetapi juga merupakan program untuk mengedukasi masyarakat agar tidak selalu menunggu bantuan pemerintah. Dengan adanya pelatihan yang diberikan akan mampu menjadikan masyarakat lebih mandiri dan menjadi batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik.

Jumlah yang telah mengikuti program kartu pra-kerja di Kota Surabaya berjumlah 388.707 orang. Sedangkan jumlah yang telah lolos 117.320 orang penerima. Program kartu pra-kerja tersebut sangatlah bermanfaat bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. (Kartu Prakerja, n.d.) Diantaranya pengetahuan peserta pelatihan meningkat, materi pelatihan yang dapat digunakan dalam praktik, materi pelatihan yang relevan dengan pekerjaannya saat ini, dan materi pelatihan yang relevan dengan pekerjaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Dan pandangan peserta program Kartu Prakerja tentang manfaat pelatihan dapat dibagi menjadi dua kategori,

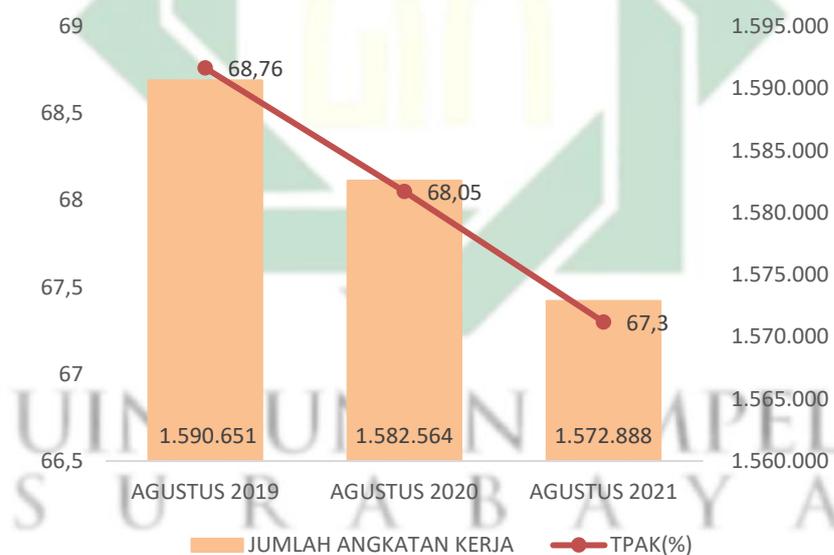
yaitu pertama, pelatihan yang diikuti bermanfaat karena peserta akan membuka usaha atau ingin mengembangkan usahanya saat ini, Pesertanya adalah calon atau agen perusahaan, dan kedua, pelatihan yang diikuti bermanfaat karena peserta bekerja atau bercita-cita untuk bekerja di bidang yang terkait dengan pelatihan, peserta adalah pekerja atau calon pekerja. (Yana, 2021)

Pada tahun 2021 masyarakat yang menganggur sekitar 55% setelah menerima program kartu pra-kerja (lolos), tetapi pada tahun ini yang menganggur tersebut telah bekerja semua, entah itu dengan membuka usaha sendiri ataupun mendapatkan pekerjaan lain. Untuk jenis pekerjaan yang telah lolos atau yang telah mengikuti beberapa langkah dalam program kartu pra-kerja ialah sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan pelatihannya atau bisa juga tidak sesuai dengan pelatihannya. Seperti marketing, Fashion, Keuangan, IT, UMKM, dan juga lain sebagainya.

Efektivitas terhadap penyerapan tenaga kerja setelah lolos mendaftarkan pada program kartu pra-kerja tersebut masih kurang efektif. Seperti salah satunya, setelah melakukan pelatihan, para peserta tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu para peserta ada yang membuka usaha kecil-kecilan untuk mengisi waktu kosongnya. Di satu sisi ada juga peserta yang lolos itu hanya mengandalkan pekerjaan dari perusahaan, tidak berusaha dengan membuka usaha kecil-kecilan. Ada juga masyarakat yang masih bekerja tetapi mendaftarkan diri pada kartu pra-kerja dan sampai ketahap lolos. Maka dari penjelasan tersebut seharusnya penyerapan pada peserta yang sudah

mendaftar itu di periksa yang lebih akurat agar peserta yang lolos tersebut memang benar-benar yang seharusnya mendapatkan kartu pra-kerja tersebut.

Untuk penurunan persentase pada pekerja (pekerja formal) diakibatkan kebijakan untuk mengurangi lapangan pekerjaan pada perusahaan selama masa pandemi. Menurut data Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan), jumlah pekerja yang terkena dampak mencapai 2.146.667. Dengan Rincian, sebesar 1.132.117 total pegawai telah dipecah dari sektor formal, dan 383.645 total pegawai dari sektor resmi, juga 630.905 orang dari sektor informal yang terkena dampak (hilangnya pendapatan). (<https://databoks.katadata.co.id>, 2020)



Sumber: Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Surabaya (BPS)

Gambar 1. 1 Jumlah Angkatan Kerja di Kota Surabaya

Pada **gambar 1.1** menunjukkan bahwasannya hasil dari data BPS Kota Surabaya ialah jumlah angkatan kerja pada Agustus tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,61%, dibandingkan dengan kondisi pada Agustus

tahun 2020. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19 diduga menjadi pemicu orang enggan untuk masuk ke pasar kerja.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Surabaya, 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	936675	636213	1572888
1. Bekerja	835750	584865	1420615
2. Pengangguran Terbuka	100925	51348	152273
II. Bukan Angkatan Kerja	209953	554388	764341
1. Sekolah	104846	116690	221536
2. Mengurus Rumah Tangga	19864	393088	412952
3. Lainnya	58924	24048	82972
4. Tidak Melakukan Kegiatan Apapun	26319	20562	46881
Jumlah	2293256	2381202	4674458

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka (BPS)

Berdasarkan angka persentase dalam **Tabel 1.1** menunjukkan banyaknya persentase laki-laki yang bekerja daripada perempuan. angkatan kerja dengan kategori jenis kelamin laki-laki sebesar 58,83%, sedangkan perempuan hanya 41,17%. Sejalan dengan hal tersebut, Data pengangguran terbuka di surabaya menyatakan bahwa memang frekuensi perempuan yang tidak bekerja memang lebih banyak, dengan hasil data BPS yaitu 33,72% pengangguran perempuan dan pengangguran laki-laki hanya 0,006%. rentang tersebut cukup tinggi mengingat perempuan kerap kali memiliki kewajiban mengurus rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga.

Tidak hanya masalah pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga ikut terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Pemberlakuan

Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) oleh pemerintah sangat mempengaruhi pekerja baik di sektor formal maupun sektor informal. Pekerja sektor informal biasanya mendapatkan upah atau pendapatan harian, namun karena menurunnya kegiatan ekonomi sulit bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, di sektor formal banyak buruh/karyawan yang di PHK karena perusahaan menghentikan usahanya.

Tabel 1.2 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Perubahan Agst 2018 - Agst 2019	Perubahan Agst 2019 - Agst 2020	Perubahan Agst 2020 - Agst 2021
	Persen		
Penduduk Usia Kerja	1,54	1,38	1,34
Angkatan Kerja	1,87	1,74	1,4
Bekerja	1,96	-0,24	2,02
Pengangguran	0,42	37,61	-6,82
Bukan Angkatan Kerja	0,86	0,64	1,22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	0,22	0,24	0,03
Laki - laki	0,45	-0,84	-0,14
Perempuan	0,01	1,32	0,21

Sumber: Bps.Go.Id, 19.37 (2021).

Pada **Tabel 1.2** merupakan Jumlah angkatan kerja selama tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan drastis, yang pada Agustus 2019-Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 1,74% dibandingkan dengan Agustus 2018-Agustus 2019 dengan nilai 1,87%. Pada Agustus 2020–Agustus 2021 juga mengalami penurunan yaitu 1,4%. Penurunan tersebut dialami oleh adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya nilai Angkatan kerja.

Untuk penurunan persentase pada pekerja (pekerja formal) diakibatkan kebijakan untuk mengurangi lapangan pekerjaan oleh perusahaan selama pandemi. Menurut data Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan), jumlah pekerja formal dan informal yang terkena dampak mencapai 2.146.667. Dengan Rincian, sebesar 1.132.117 total pegawai telah dipecat dari sektor formal, dan 383.645 total pegawai dari sektor resmi, juga 630.905 orang dari sektor informal yang terkena dampak (hilangnya pendapatan).

Pengangguran pada tahun 2020 meningkat secara drastis yaitu sebesar 37,61%. dibandingkan dengan tahun 2019 nilai pengangguran ialah hanya 0,42%. Tingginya nilai pengangguran di Indonesia di akibatkan adanya Pandemi COVID-19. Dikarenakan banyak pekerja yang terkena PHK oleh perusahaan serta banyak dari masyarakat yang termasuk dari golongan pekerjaan formal dan informal yang mengalami hantaman pandemi sehingga kegiatan pekerjaan mereka tidak dapat begitu maksimal.

Berdasarkan permasalahan terkait program kartu Prakerja, tentu menimbulkan masalah–masalah yang menarik untuk diteliti. Sehingga penulis terdorong untuk meneliti dan juga mengkaji “Analisis Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dilatarbelakangi masalah teridentifikasi beberapa permasalahan yang terkait tentang efektivitas program prakerja dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya pada masa pandemi Covid-19, antara lain:

- 1) Program pemerintah pada masa pandemi Covid-19 salah satunya ialah program kartu pra-kerja.
- 2) Penyaluran program prakerja di kota Surabaya
- 3) Minimnya ke efektivitas pada program kartu pra-kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya pada masa pandemi Covid-19.
- 4) Kurang efektif pada program kartu pra-kerja terhadap penyerapan tenaga kerja setelah lolos dalam pendaftaran.
- 5) Pelatihan program kartu pra-kerja kurang maksimal
- 6) Minimnya informasi bagi masyarakat yang tidak memiliki sosial media
- 7) Banyak yang mendaftar dan juga lolos pada waktu mendaftarkan program kartu pra-kerja tetapi masih dalam keadaan bekerja
- 8) Sempitnya peluang kerja di masa pandemi Covid-19
- 9) Kurangnya kreativitas pada masyarakat yang mengakibatkan menjadi pengangguran.

1.2.2 Batasan Masalah

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang terkena dampaknya pandemi Covid-19. Salah satu banyaknya pengangguran di Indonesia, maka dari itu pemerintah membuat program kartu prakerja. Dengan begitu penelitian ini hanya di batasi pada:

- 1) Program kartu pra-kerja di kota Surabaya pada masa pandemi Covid-19.
- 2) Efektivitas program kartu prakerja dalam penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya pada masa pandemi Covid-19.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat disusun rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana program kartu pra-kerja di kota Surabaya pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana efektivitas program kartu prakerja dalam penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya pada masa pandemi Covid-19?

1.4 Kajian Pustaka

Berbagai macam penelitian yang meneliti tentang Efektivitas Program Kartu Prakerja bagi penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya pada masa Pandemi COVID-19 telah dilaksanakan, seperti peneliti lain yang telah dilakukan oleh :

Tabel 1.3 Kajian Pustaka

No.	Nama/ Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Anelia Meilani L.G, (2021).	Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)	Berdasarkan penelitian tersebut, setiap bagian dari masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang baik, dengan begitu program kartu pra- kerja sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terkena dampak Coronavirus Disease 2019, seperti salah satunya PHK dan Pengangguran, Sehingga bisa meningkatkan angkatan kerja dan juga mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya manfaat saja, dibentuknya program Kartu Prakerja itu berguna untuk menjaga perekonomian bagi penerima kartu prakerja. Meskipun begitu program	Dalam penelitian tersebut membahas tentang pemenuhan hak tenaga kerja yang terkena dampak yaitu salah satunya PHK. Sedangkan disini yang peneliti teliti yaitu membahas tentang efektivitas program kartu pra- kerja dalam penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya pada masa pandemi.

			tersebut sering di anggap tidak dapat memenuhi kebutuhan, dikarenakan tingginya presentase jumlah orang yang di PHK dan pengangguran. Maka dari itu pemerintah mengusahakan agar masyarakat yang terkena dampaknya masih bisa memenuhi kebutuhannya.	
2	Putri, (2021)	Pengaruh Pelatihan Dan Insentif Terhadap Pengetahuan Dan Serapan Tenaga Kerja Pada Penerima Kartu Prakerja Di Kota Makassar	Berdasarkan penelitian tersebut ialah pemerintah memberikan program kartu pra-kerja dan juga memberikan fasilitas seperti pelatihan kerja dan insentif. Dengan begitu pemerintah mengharapkan agar masyarakat mampu memperluas pengetahuannya dan juga bisa memperbaiki kondisi angkatan kerja	Dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dari peneliti ini, seperti memakai metode kuantitatif dan juga letak lokasi yang berbeda yaitu di Makassar. Sedangkan peneliti disini memakai metode penelitian kualitatif dan juga letak lokasinya berada di Surabaya.

			dengan siap bekerja yang terampil.	
3	(Ardi Rohmah, 2019)	Kontribusi Sektor Industri Kecil Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia	Jumlah industri berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Dengan berkembangnya industri di Indonesia, bisa lebih membutuhkan tenaga kerja yang besar dalam proses produksinya. Sehingga ,hal tersebut berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dikarenakan, semakin banyaknya perindustrian, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Seperti Industri kecil-kecil an seperti UMKM yang menjadi prioritas utama Pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja. Perkembangan industri yang	Perbedaan dalam penelitian tersebut ialah peneliti tersebut membahas tentang keseluruhan tenaga kerja di Indonesia, sedangkan peneliti yang diteliti saat ini membahas tentang penyerapan tenaga kerja di hanya kota Surabaya terhadap program kartu pra-kerja.

			berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan perekonomian di Indonesia pada tahun 2013 sekitar 16,42% dan di tahun setelahnya sebesar 22,80%.	
4	(Hanifah, 2019)	Analisis penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di provinsi Jawa Tengah periode 1980 – 2015	Bahwa penelitian tersebut, membahas tentang jumlah unit usaha, nilai produksi, serta upah minimum yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah pada periode 1980 – 2015 ialah sebesar 93,11%. Sedangkan yang tersisa merupakan penyerapan tenaga kerja sektor industri dan menengah sekitar 6,89%.	Dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam letak lokasi penelitian. Penelitian tersebut meneliti di lokasi Jawa Tengah dan juga metode yang digunakan ialah metode kuantitatif. Sedangkan letak lokasi yang sedang melakukan penelitian ialah di Kota Surabaya dan juga pada metode penelitian menggunakan metode kualitatif.
5	Husni Nuryanti (HS, 2020)	Sistem pendukung keputusan pada penentuan penerimaan kartu pra-kerja	Berdasarkan argument peneliti tersebut, dibangunnya sistem pendukung	Perbedaan dalam penelitian tersebut ialah, peneliti tersebut meneliti tentang pembuatan

		menggunakan metode <i>Simple Additive Weighting</i>	keputusan pada penentuan penerimaan kartu prakerja menggunakan metode SAW dipercaya dapat mempercepat proses penerimaan calon peserta baru dengan metode perhitungan yang akurat dalam perekomendasi penerima calon Kartu Prakerja. Dengan begitu, sistem tersebut juga mempermudah petugas dalam menginput data calon penerima Kartu Prakerja.	web untuk penentuan penerimaan program kartu pra-kerja. Sedangkan peneliti yang sedang diteliti ini ialah meneliti tentang efektivitasnya program prakerja terhadap penyerapan tenaga kerja.
--	--	---	---	--

Bahwa beberapa peneliti sebelumnya yang telah tertera pada **Tabel 1.2** tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti yang sedang diteliti ini. Perbedaan dari peneliti di atas seperti tempat lokasi yang berbeda, metode penelitiannya, dan juga maksud yang diteliti berbeda.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui program kartu pra-kerja di kota Surabaya pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui efektivitas program kartu pra-kerja dalam penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya pada masa pandemi COVID-19.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Menurut kajian hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak lainnya, baik secara teoritis maupun juga secara praktis, antara lain:

1.6.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan tentang Program Kartu Prakerja terhadap penyerapan tenaga kerja dari kantor pusat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ekonomi (PPID Kemenko), seperti yang diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu yang dipelajari secara teoritis dalam perkuliahan.

1.6.2 Manfaat Secara Praktis

1) Manfaat Bagi Masyarakat

Adanya sumber acuan atau penjelasan terkait keadaan perekonomian pada saat pandemi Covid-19 dan program pemerintah yaitu tentang Program Kartu Pra-Kerja. Program Kartu Pra-Kerja tersebut bisa membantu pengembangan keahlian dan kompetensi seorang angkatan kerja serta meningkatkan kemampuan produktivitas

hingga kemampuan untuk bersaing dalam rana dunia kerja dan membekali angkatan kerja dengan pengetahuan kewirausahaan.

2) Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar bisa memperkuat dan juga bisa mengembangkan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut kedepannya.

3) Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada peneliti ini diharapkan menguasai untuk membawa pemahaman juga penambahan wawasan terhadap peneliti berikutnya akan atas bagaimana program kartu prakerja kedepannya, apakah masih berlanjut atau hanya sampai hilangnya pandemi Covid-19. Sebagai bahan acuan maupun pembanding bagi para akademisi serta masyarakat umum untuk melakukan sebuah penelitian sejenis sehingga dapat dikembangkan secara lanjut sehingga dapat menciptakan sebuah acuan pada penelitian sejenis dengan lebih konkrit.

1.7 Definisi Operasional

Pada definisi operasional akan disajikan sebuah bahan arahan seorang peneliti sebagai penuntun dalam melakukan penelitian sehingga hal yang akan dilakukan peneliti ialah menyusun definisi konsep. Begitu juga dalam penelitian ini, peneliti telah memabarkan definisi terkait penelitian tersebut, sebagai berikut:

1) Tenaga Kerja

Menurut (Dumairy, 1997), tergolong sebagai tenaga kerja merupakan penduduk yang memiliki batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batasan usia ialah agar mendapatkan gambaran kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batasan usia yang berbeda karena situasi kerja setiap negara juga berbeda, sehingga batasan usia kerja tidak sama antar negara.

2) Penyerapan Tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja ialah kemampuan sebuah lapangan pekerjaan untuk menampung dan mendaya gunakan tenaga kerja dari banyak-nya seorang angkatan kerja. (Simanjutak, 2001) Dari penjelasan tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa Penyerapan tenaga kerja ialah permintaan akan tenaga kerja dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhan sebuah lapangan pekerjaan yang mana nantinya tenaga kerja tersebut dituntut untuk menghasilkan suatu output berupa barang maupun jasa sesuai dengan ketentuan perusahaan.

3) Pengangguran

Menurut (Sadono Sukirno, 1994) Pengangguran merupakan jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.

4) Pandemi Covid-19

Pandemi ialah wabah yang terjadi secara bersamaan dan juga sudah menyebar luas. Menurut WHO (2020), penyakit Covid-19 merupakan

penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa perawatan khusus. Orang tua yang berumur dan juga orang-orang yang memiliki kondisi medis penyakit seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker, semuanya dapat terinfeksi COVID-19. Putu Sekarwangi Saraswati, (2020:147–52)

5) Kebijakan Publik

Menurut Rawie & Samputra (2020), alternatif kebijakan yang memberikan manfaat besar dan biaya kecil adalah dengan memberikan pelatihan kepada para pengangguran. Jika hanya memberikan jaminan sosial tanpa adanya pelatihan kepada pengangguran tidak serta merta meningkatkan rata-rata pendapatan nasional.

6) Efektivitas

Menurut (Mardiasmo, 2016, p.134) Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.

7) Program Kartu Prakerja

Program kartu pra-kerja merupakan program besutan terbaru pemerintah yang berfungsi sebagai peningkatan kompetensi dan bekal angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. (Kartu Prakerja, 2022).

Jadi efektivitas program kartu prakerja ialah pencapaian program yang telah di buat oleh pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak

Covid-19 agar tidak kekurangan dalam kebutuhan sehari-harinya, seperti mendapatkan pekerjaan.

8) Pelatihan

Menurut (Hadari, 2005:208) Pelatihan merupakan program-program untuk memperbaiki kemampuan dengan melaksanakan pekerjaan secara individual, kelompok dan atau berdasarkan jenjang jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin di capai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam suatu jabatan atau fungsi saat ini.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Data Yang Diteliti

Peneitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19”. Sesuai dengan tujuan penelitian dan juga jenis penelitian yang akan di gunakan ialah penelitian kualitatif dengan melakukan narasi deskriptif, hal ini guna mendeskripsikan dengan cara mengamati, mewawancarai dan menganalisis dokumen dari narasumber seperti masyarakat yang pernah mendaftar program kartu pra-kerja, dengan data yang diperoleh secara terperinci dan juga

sesuai dengan kondisi terkena dampak pandemi Covid-19 yang berada di kota Surabaya.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua macam berdasarkan sumber data yang sering digunakan anatar lain data primer maupun data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan melalui observasi langsung dilapangan yang berasal dari sumber empiris. Sebagai contoh yakni kegiatan wawancara kepada yang bersangkutan seperti masyarakat yang pernah mendaftar pada program kartu pra-kerja.

2) Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data dari penelitian atau kajian yang telah ada sehingga peneliti melakukan pengamatan atau pengkajian dari sebuah penelitian terdahulu baik berupa artikel, buku, dokumen maupun arsip guna mencari informasi yang relevan dengan kebutuhan peneliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung sebuah objek yang akan diteliti dengan sistematis dan terstruktur. Observasi ini dilakukan untuk mengamati

suatu proses dan perilaku suatu objek dengan jumlah responden yang tidak terlalu besar contohnya suatu proses cara kerja, perilaku manusia, gejala – gejala suatu komoditas dan lain sebagainya.

Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik observasi terus terang. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data dan menyatakan terus terang kepada sumber data. Jadi dengan itu, peneliti dapat mengetahui rencana awal sampai akhir dari aktivitas peneliti. Akan tetapi, tidak semua harus terus terang dalam observasi. Hal tersebut dilakukan hanya untuk menghindari jikalau terdapat suatu data yang masih dirahasiakan atau disebut dengan observasi samar.

2) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara narasumber dengan peneliti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam melakukan wawancara terdapat pedoman dan kaidah dalam berwawancara sehingga kita dapat melakukan wawancara dengan baik hingga informasi dari informan dapat terserap dengan baik dan terkumpul menjadi data yang dibutuhkan.

Teknik wawancara dilakukan peneliti ialah teknik wawancara tak berstruktur, yang mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang terperinci dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang telah

mengikuti program kartu pra-kerja. Dengan ini diharapkan dapat memberikan juga menguatkan informasi maupun data yang relevan dan benar adanya terkait efektifnya program kartu prakerja terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya pada masa pandemi Covid-19.

3) Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip dalam pengumpulan data ialah teknik pengambilan informasi berdasarkan bahan Pustaka baik berupa gambar, buku, jurnal, laporan ilmiah sebelumnya dan lain sebagainya. Pengumpulan data dengan beberapa hal tersebut dilakukan guna mendapatkan informasi akan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam metode ini keberadaan komponen tersebut merupakan objek penting dalam pengumpulan data sehingga objek penelitian metode ini ialah non manusia.

4) Informasi Penelitian

Informan penelitian merupakan yang penting dalam pengumpulan data penelitian, Dalam pemelihan informan peneliti harus memerhatikan keintensitasan dan keturut sertaan informan tersebut dalam bidang yang akan diteliti. Informan biasanya anggota kelompok partisipan yang secara langsung turut terlibat langsung dengan permasalahan penelitian tersebut.

Informan dipilih berdasarkan kepahaman dan pengalamannya dalam suatu hal yang bermanfaat bagi penelitian dengan cara

purposive sampling yakni penarikan sampel secara subjektif dengan maksud dan tujuan tersebut. Informan pada penelitian ini adalah :

- a) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Ekonomi (PPID Kemenko),
- b) BPS
- c) Masyarakat

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam jenis penelitian kualitatif ini, Menurut Sugiyono (2012), Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan lainnya, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1) Reduksi Data

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin besar jumlah data, semakin kompleks dan rumit Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan agar data tidak menumpuk sehingga tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam analisis adalah penyajian data. Penyajian data diorientasikan agar data yang direduksi tersusun, tersusun dalam pola relasional yang lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa deskripsi naratif, grafik, hubungan antar kategori, dan diagram alur. Penyajian data dalam bentuk ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami apa yang sedang terjadi. Pada langkah ini, peneliti mencoba untuk menyusun data yang relevan sehingga informasi yang diperoleh konklusif dan memiliki beberapa makna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan memverifikasi data. Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk menemukan atau memahami makna, pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi Analisis tidak dilakukan sekali, tetapi berinteraksi dengan kegiatan reduksi, penyajian, dan kesimpulan atau verifikasi selama penelitian. Setelah verifikasi, kesimpulan dapat ditarik berdasarkan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data. (Sugiyono, 2015:137-145).

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini maka peneliti akan Menyusun sebuah sistematika yang terstruktur sesuai dengan ketentuan penelitian kualitatif, yakni:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini akan bermuatan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan hasil penelitian definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Kerangka Teoritis

Bab ini akan menjabarkan akan beberapa acuan berupa landasan teori yang selaras dengan keadaan efektivitas program kartu prakerja dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya dan berisi uraian penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

BAB III. Metode Penelitian

Bab ini akan berisi hasil uraian deskriptif dari data data yang telah dikumpulkan dengan uraian variabel penelitian yang tidak akan dibaur dengan opini peneliti. Deskriptif data penelitian ini akan dijelaskan secara objektif, jelas dan nyata tentang efektivitas program kartu prakerja dalam penyerapan

tenaga kerja di kota Surabaya pada masa pandemi Covid-19.

BAB IV

Gambaran Umum dan Data Penelitian

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum dan juga menyajikan beberapa data penelitian yang sudah diteliti

BAB V.

Analisis Data

Bab ini akan menyajikan hasil analisis secara metode kualitatif akan penelitian nantinya hasil analisis tersebut akan disajikan secara deskriptif yakni penyajian berupa kata kata yang akan menjawab masalah penelitian serta mengintegrasikan hasil temuan ini kepada teori lama dan Menyusun sebuah teori baru.

BAB VI.

Penutup

Pada BAB terakhir ini akan berisi kesimpulan, daftar Pustaka dan saran penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Tenaga Kerja

2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Sumarsono, Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi masyarakat yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau orang-orang yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.

Menurut (Dumairy, 1997), tergolong sebagai tenaga kerja merupakan penduduk yang memiliki batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batasan usia ialah agar mendapatkan gambaran kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batasan usia yang berbeda karena situasi kerja setiap negara juga berbeda, sehingga batasan usia kerja tidak sama antar negara.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (Kesowo, 2003)

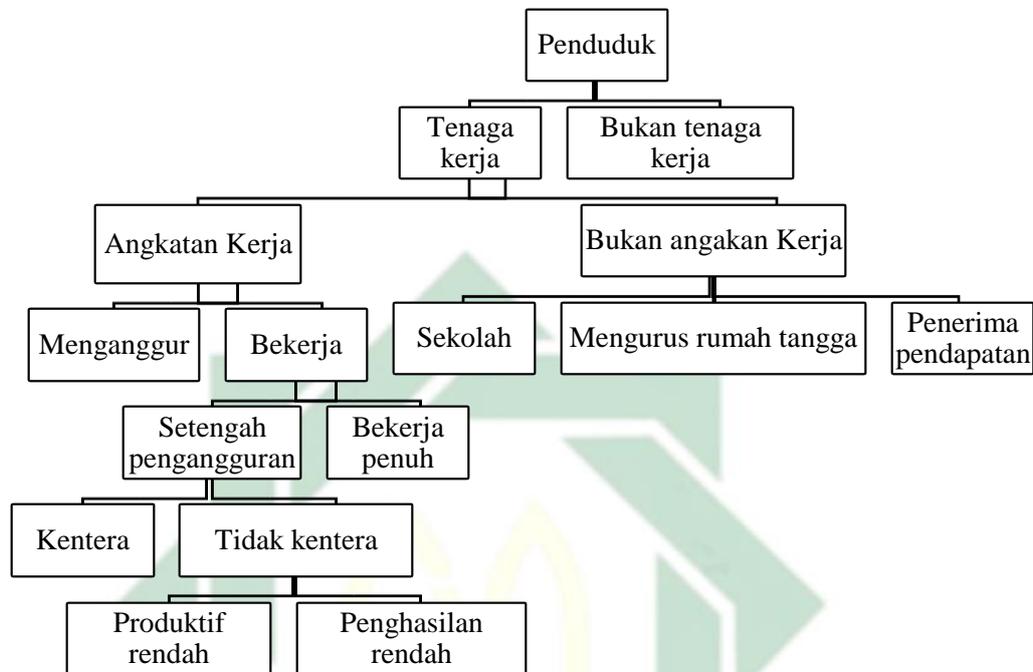
Secara umum, penduduk suatu negara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja didefinisikan sebagai semua penduduk usia

kerja atau produktif. Batasan usia kerja yang berlaku di Indonesia saat ini adalah usia penduduk antara 15 hingga 64 tahun. Sedangkan penduduk bukan tenaga kerja ialah penduduk yang tidak dalam usia kerja, yaitu penduduk yang berumur antara 0 sampai 14 tahun dan penduduk yang berumur diatas 65 tahun. (Badan Pusat Statistik, n.d.)

Menurut UU No 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, batasan usia minimal pekerja di Indonesia adalah 15 tahun dan tidak ada batasan usia maksimal. Penetapan batas usia ini didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia saat ini belum mampu memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang dapat menerima jaminan hari tua, yaitu pegawai negeri sipil dan sebagian kecil pegawai swasta. Sebagian penduduk yang mencapai usia pensiun yang masih aktif secara ekonomi masih tergolong bekerja.

Menurut (Simanjutak, 2001), pada **Gambar 2.1** menjelaskan tentang banyaknya banyaknya tenaga kerja yang menawarkan diri dalam membantu proses produksi, tergantung pada banyaknya penyediaan atau supply tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat. Jumlah orang yang menawarkan diri menjadi tenaga kerja tersebut terbagi menjadi 3 golongan yaitu orang yang telah bekerja, orang yang siap bekerja, serta orang yang sedang mencari pekerjaan. Keadaan ini sering disebut angkatan kerja atau Labour Force, sedangkan Total Labour Force merupakan konsep angkatan kerja secara menyeluruh. Konsep Total

Labour Force ini merumuskan jumlah keseluruhan dari angkatan kerja yang tidak dilembagakan dan yang berusia 16 tahun.



Sumber: Simanjutak, 1998

Gambar 2. 1 Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja menghasilkan barang atau produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat. Dengan begitu terkait batasan usia, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dapat dibedakan atas usia dalam penduduk setiap masing-masing negara.

2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi, dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian.

Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. (Haryo Kuncoro, 2002:45–56)

Penyerapan tenaga kerja erat dikaitkan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja merupakan situasi yang menggambarkan jumlah ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja, serta banyaknya tenaga kerja yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Secara umum bahwa kesempatan kerja diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dapat atau akan berkontribusi aktif dalam perekonomian. Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada.

Menurut (Simanjutak, 2001), Penyediaan tenaga kerja adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Ada yang dinamakan kelompok yang bekerja, kelompok yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari kerja disebut pencari kerja atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan mencari kerja dinamakan angkatan kerja (labor force). Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah.

Dari penjelasan para ahli bisa di simpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan permintaan akan tenaga kerja dalam jumlah yang

terbatas sesuai dengan kebutuhan sebuah lapangan pekerjaan yang mana nantinya tenaga kerja tersebut dituntut untuk menghasilkan suatu output berupa barang maupun jasa sesuai dengan ketentuan perusahaan.

2.1.3 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Menurut (Rokhedi, 2012:4), permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan terhadap barang dan jasa. Artinya jumlah tenaga kerja yang diminta sangat tergantung pada jumlah permintaan terhadap barang dan jasa. Semakin banyak permintaan terhadap barang dan jasa maka semakin tinggi pula permintaan terhadap tenaga kerja. Tenaga kerja diminta karena kemampuannya untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa, maka permintaan tenaga kerja didasarkan pada tingkat produktivitas tenaga kerja. Meskipun demikian, permintaan terhadap tenaga kerja tidak dapat berdiri sendiri karena juga dipengaruhi oleh tingkat penggunaan faktor produksi lainnya seperti modal. Hubungan antara tenaga kerja dan modal dapat bersifat substitusi atau saling menggantikan, maupun bersifat komplementer atau saling melengkapi. Jika hubungan bersifat substitusi, maka kenaikan penggunaan pada faktor produksi modal berarti akan mengurangi permintaan tenaga kerja, dan sebaliknya jika perusahaan meminta lebih sedikit modal berarti akan diikuti oleh kenaikan permintaan tenaga kerja.

Permintaan tenaga kerja dapat dibedakan menjadi permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan permintaan tenaga kerja dalam

jangka panjang. Dalam jangka pendek, faktor produksi tenaga kerja dianggap variabel artinya dapat berubah jumlahnya, sedangkan faktor produksi lainnya, misalnya modal, dianggap tetap atau konstan. Sedangkan permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang mengasumsikan bahwa semua input atau faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, adalah tidak tetap atau bersifat variabel.

Sedangkan Penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan yang berkaitan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Kurva penawaran tenaga kerja biasanya menunjukkan jumlah maksimum tenaga kerja yang siap dipekerjakan pada setiap pilihan tingkat upah untuk periode waktu tertentu. Kurva penawaran tenaga kerja dapat di pandang sebagai tolok ukur kemungkinan jumlah tenaga kerja yang tersedia pada pasar tenaga kerja, dengan tingkat upah minimum yang telah disepakati oleh penyedia lapangan kerja yaitu pengusaha maupun instansi terkait. (Irna Yani Manalu, 2021)

Karena pasokan tenaga kerja adalah fungsi dari upah, maka jumlah tenaga kerja yang tersedia akan dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, semakin banyak tenaga kerja yang tersedia. Tawaran tenaga kerja itu sendiri mencerminkan jumlah pekerja yang bersedia dan mampu melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan imbalan - pekerjaan (upah atau gaji, dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang). Pasokan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja dengan upah apa pun yang mungkin dalam

jangka waktu tertentu. Jumlah orang yang menawarkan layanan mereka untuk proses produksi disebut sebagai tawaran tenaga kerja di masyarakat. (Rusalia, 2018).

2.1.4 Angkatan Kerja

Angkatan kerja secara demografi ditentukan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja, atau berapa persentase angkatan kerja menjadi. Dengan demikian, angkatan kerja didefinisikan sebagai tenaga kerja aktual dan mereka yang berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Kelompok angkatan kerja terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu:

1. Angkatan Kerja yang Bekerja

- a) Kelompok yang bekerja sekurang-kurangnya dua hari dalam seminggu sebelum pencacahan dan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan..
- b) Kelompok yang tidak bekerja atau bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu sebelum pencacahan, tetapi termasuk pekerja tetap, petani-petani, dan orang-orang yang bekerja dalam keterampilan..

2. Angkatan Kerja yang Mencari Pekerjaan

- a) Kelompok yang belum pernah bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
- b) Baik kelompok yang bekerja pada saat pencacahan maupun kelompok yang sedang mencari pekerjaan menganggur.

- c) Kelompok yang bebas dana sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Bukan angkatan kerja (not in the labour force) merupakan mengacu pada anggota angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Ada empat jenis kelompok non-angkatan kerja:

1. Sekolah untuk kelompok orang yang satu-satunya kegiatannya adalah di sekolah.
2. Mengurus rumah tangga adalah untuk mereka yang satu-satunya tugasnya adalah mengurus rumah tangga.
3. Penerimaan penghasilan diperuntukkan bagi mereka yang tidak bekerja tetapi menerima penghasilan, seperti pensiun, bunga deposito, hasil sewa, dan sebagainya.
4. Lainnya adalah mereka yang hidupnya bergantung pada orang lain karena usia tua, kelumpuhan, atau faktor lainnya.

2.2 Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indicator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut (Sadono Sukirno, 1994) Pengangguran merupakan jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.

Menurut (Simanjutak, 2001) Pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa, Pengangguran adalah ketimpangan kesempatan yang terjadi antara angkatan kerja dan kesempatan kerja, sehingga sebagian angkatan kerja tidak dapat melakukan kegiatan bekerja. Terjadinya pengangguran tidak hanya disebabkan karena kurangnya lowongan pekerja, akan tetapi juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Persyaratan – persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja tidak dapat terpenuhi oleh pencari kerja. Persyaratan yang diajukan bisa dari segi pendidikan, usia, keterampilan dan lain sebagainya.

2.2.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Jenis-Jenis pengangguran sebagai berikut:

- 1) Pengangguran Friksional, ialah pengangguran yang terjadi akibat kesenjangan waktu, informasi, maupun kondisi geografis antara pencari kerja dan lowongan kerja.
- 2) Pengangguran Struktural, ialah pengangguran yang terjadi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang ada.
- 3) Pengangguran musiman, ialah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Pengangguran berkaitan dengan fluktuasi kegiatan

ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian.
(Simanjutak, 1998:14)

2.2.2 Faktor Penyebab Pengangguran

Angka pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Berikut ini beberapa penyebabnya (Gatiningsih dan Sutrisno, 2017):

1) Turunnya Output dan Pengeluaran Total

Menurunnya output dan pengeluaran dapat terjadi ketika kemampuan ekonomi sebuah negara lebih rendah daripada kemampuan yang seharusnya dicapai. Hal ini biasanya terjadi ketika siklus perekonomian menurun dan banyak orang yang terpaksa menganggur. Dikarenakan banyaknya orang yang ingin bekerja tidak sebanding dengan pekerjaan yang tersedia.

2) Tidak Sebandingnya Penawaran dengan Permintaan Pekerja

Penyebab paling umum pada pengangguran sendiri ialah tingginya penawaran pekerja, sedangkan permintaan terhadap pekerjaan itu sendiri rendah, sehingga tidak mampu untuk menyesuaikan.

3) Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencari Pekerjaan

Setiap pencari pekerja memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini bisa menyebabkan adanya perbedaan waktu yang dibutuhkan pada setiap orang dalam mendapatkan pekerjaan.

4) Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin bergantung terhadap mesin, dan juga menyebabkan berkurangnya tenaga kerja untuk manusia. Sehingga lapangan pekerjaan berkurang dan juga menyebabkan angka pengangguran tinggi. Dengan begitu upaya pemerintah ialah untuk menyiapkan kualifikasi tenaga kerja dengan program-program pelatihan kerja.

2.2.3 Dampak Pengangguran

Tingginya angka penganggiran memiliki dampak bagi perekonomian dan kehidupan sosial. Berikut ini beberapa dampak pengangguran (Indayani et al., 2020):

- 1) Menurunnya aktivitas perekonomian
- 2) Menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per-kapita
- 3) Meningkatkan biaya sosial
- 4) Menurunlan tingkat keterampilan
- 5) Menurunkan penerimaan negara
- 6) Menurunnya investasi dan pembentukan modal
- 7) Pemborosan sumber daya dan potensi manusia

2.3 Pandemi Covid-19

Menurut WHO (2020), Penyakit Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus corona akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa perawatan khusus. Orang tua yang berumur

dan juga orang-orang yang memiliki kondisi medis penyakit seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker, semuanya dapat terinfeksi COVID-19. (Putu Sekarwangi Saraswati, 2020).

Penyebaran kasus Covid-19 sangat cepat dan telah menyebar secara nasional, termasuk Indonesia. Covid-19 mengakibatkan berbagai macam kondisi medis, mulai dari flu biasa hingga kondisi yang lebih serius seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan akut parah (SARS-CoV). Covid-19 adalah penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia pada tahun. Penyebaran Covid-19 sangat cepat, termasuk di luar negeri. Hingga saat ini, Covid-19 telah teridentifikasi di 188 negara.

Secara fisik dan psikologi, Pandemi Covid 19 telah mempengaruhi kehidupan manusia lebih dari 8,9 milyar jiwa serta mendorong ketidakstabilan kehidupan dunia. Sebagaimana masyarakat terdesak untuk menerapkan kegiatan pembatasan sosial yakni sosial distancing. Kegiatan ini merupakan kegiatan menerapkan jarak aman, berdiam dirumah dengan memutasikan pekerjaan untuk dikerjakan dirumah hingga prosesi kegiatan keibadahan pun turut dimutasikan dengan dikerjakan didalam rumah. Hal ini telah terjadi sekitar 2 tahun, dimana lokasi tersebut merambah dan meluas jangkauan cakupan penyebaran wabah ini.

Wabah Covid-19 yang menyebar dengan ganasnya ke belahan dunia hingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian global, dan juga termasuk perekonomian Indonesia. Bahkan banyak negara yang melakukan pencegahan atau menekan potensi penularan dari banyak negara

yang telah mengalami ombak pandemi ini. Maka dari itu tindakan pencegahan seperti karantina, isolasi wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar (SSR) yang sedang dilakukan mengakibatkan beberapa penerbangan telah ditangguhkan di beberapa negara. Transportasi darat dan laut juga dibatasi, dan lagi banyak industri lain yang turut menghentikan produksinya. Sejumlah penerbangan diberhentikan di berbagai negara. Transportasi darat dan laut juga di batasi. Dan sejumlah industri lainnya berhenti juga berproduksi. (Dedi Junaedi; Faisal Salistia, 2020).

2.3.1 Dampak Covid-19

Ada beberapa dampak yang terjadi di Indonesia. Dampak pertama ialah semakin turunnya daya beli masyarakat yang berasal dari konsumsi rumah tangga secara umum. Penurunan daya beli ini telah mengalami perubahan yang sangat curam seiring dengan penerapan PPKM yang masih terus berlanjut maka permasalahan yang serius juga akan mengancam perekonomian masyarakat. Kebijakan – kebijakan akan penerapan regulasi pemerintah seperti PPKM ini diharapkan dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi masyarakat berupa bantuan baik bantuan dana maupun solusi untuk peningkatan kembali kemampuan daya beli tersebut. (Iswari, 2021)

Selain berdampak pada tingkat daya beli, Kebijakan ini pun turut mempengaruhi rana investasi. Penurunan akan kegiatan investasi ini terlihat jelas pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama pandemic

kegiatan perekonomian nasional mengalami gejolak yang sangat signifikan hingga mengakibatkan ketidak menentuan kondisi perekonomian baik perekonomian nasional maupun perekonomian suatu daerah. Ketika sektor ekonomi yang terdampak maka akan banyak investor yang merasa ragu untuk melakukan investasi sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menanamkan modal pada suatu perusahaan atau badan usaha.

Pengaruh penerapan PPKM telah memangkas banyak jumlah investor dalam banyak sektor, antara lain : sektor pariwisata, sektor hiburan dan seni budaya, sektor transportasi dan travel serta sektor kuliner. Beberapa sektor tersebut dulunya merupakan sektor yang digandrungi bagi investor karena sirkulasi ekonomi pada sektor tersebut membawa keuntungan yang tinggi. Namun pada saat ini sektor tersebut mengalami penurunan yang drastis terlebih dengan penerapan kebijakan PPKM yang membuat penghambatan sirkulasi tersebut.

Dampak selanjutnya ialah pelemahan pada sektor perekonomian baik perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Penurunan akan pendapatan dari pajak mengalami perubahan yang signifikan akibat penekanan penerimaan sektor pajak serta dapat merubah kestabilan alokasi anggaran dana yang sebelumnya telah terstruktur. Hal ini terjadi adanya tantangan bagi pemerintah cabang (daerah) dan pemerintah pusat (nasional) di masa pandemi yang mana pengkajian akan solusi dari dampak penerapan pembatasan mobilitas ini harus dikaji hingga

menemukan suatu realokasi anggaran dan refocusing anggaran dari anggaran – anggaran yang telah tersusun sebelumnya.

Hal yang turut diperhatikan yakni dampak akan revolusi pola bisnis, Revolusi ini ialah perubahan akan pola bisnis lama kepada pola bisnis baru yang diakibatkan mewabahnya pandemi. Pembatasan mobilitas masyarakat serta pembatasan jarak sosial mengakibatkan perubahan perilaku dalam kegiatan perekonomian. Perubahan pola perilaku ini dikatakan dengan pola baru akibat pandemic hal ini menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan pola bisnis dan ekonomi yang selaras dengan pandemic Covid 19.

Dampak terakhir, cukup tersignifikan ialah penggunaan IPTEK yakni modernnya zaman sekarang yang bisa disebut dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi ini memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas secara mandiri dan konvensional. Inovasi dari hal ini ialah bagaimana suatu pekerjaan yang dilakukan secara bertatap muka langsung dan berkerumun dapat dimutasikan dengan suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan jarak jauh. Penerapan suatu sistem komunikasi jarak jauh ini sudah bukan lagi barang mewah dan hanya digunakan bagi segelintir orang namun dewasa ini sistem ini harus diterapkan baik dalam bidang pekerjaan, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan lain sebagainya. Namun perubahan sistem ini turut memiliki suatu kekurangan dan hambatan yakni pada saat seseorang belum mampu memahami dan beradaptasi dengan kemajuan serta

perubahan teknologi yang ada sehingga kajian yang akan pembekalan ilmu teknologi harus diterapkan pada setiap belahan masyarakat. (<https://www.dprd-diy.go.id>, n.d.)

2.3.2 Upaya Pemerintah

Menurut (Predianto, 2020) Pemerintah memberikan upaya-upaya atas pencegahan dari pengangguran. Upaya pemerintah sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran dana sebagai bentuk penanganan Covid 19, Hal tersebut dilakukan untuk menstabilkan laju ekonomi agar dapat berputar sehingga ancaman akan pemutusan hubungan pekerjaan dapat terminimalisir.
2. Insentif pajak, pelonggaran pinjaman/kredit, penyediaan lapangan kerja dan juga program jaminan sosial akan diterapkan dalam bentuk iuran.
3. Menyediakan penjangkaran pengamanan sosial bagi pekerja sektor informasi dan miskin yang terglong beresiko.
4. Menekankan pelatihan skill dan keahlian yang lebih intens melalui program prakerja bagi para tenaga kerja yang berdampak akan pemutusan hubungan kerja.
5. Fokus pada program padat karya yang menumbuhkan keterampilan dan kreativitas masyarakat dapat berupa tenaga kerja manufaktur padat karya, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Teknologi Tepat Guna (TTG) dan kewirausahaan yang memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

6. Memberikan panduan serta pemahaman akan pengetahuan dunia kerja bagi pengusaha dan pekerja, Terutama pemahaman akan perlindungan keselamatan, Kesehatan dan kesejahteraan pekerja terlebih pada saat pekerja menderita Covid 19 yang diakibatkan pada lingkungan kerja.

2.4 Kebijakan Publik

Carl J Federick sebagaimana dikutip (Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005) proses kebijakan publik terdiri dari lima tahap, yaitu:

1. Menetapkan agenda, yaitu suatu masalah dapat mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Perumusan kebijakan, yaitu proses perumusan pada pilihan kebijakan oleh pemerintah.

3. Pembuatan kebijakan, yaitu suatu proses ketika pemerintah memilih untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yaitu proses untuk mengimplementasikan kebijakan guna mencapai suatu hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yaitu proses pemantauan dan pemilihan hasil kerja atau kebijakan.

Konsep kebijakan yang ditawarkan Anderson menurut (Budi Winarno, 2007:18) dianggap lebih tepat karena berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga secara jelas membedakan antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision) yang berarti memilih di antara berbagai alternatif.

Menawarkan pelatihan kepada para pengangguran adalah kebijakan alternatif yang memiliki keuntungan signifikan dan biaya rendah, klaim (Rawie & Samputra, 2020). Pendapatan nasional rata-rata tidak serta merta tumbuh jika jaminan sosial adalah satu-satunya hal yang diberikan kepada orang-orang yang menganggur tanpa keterampilan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu dalam rangka memecahkan masalah publik atau untuk kepentingan publik berdasarkan pendapat banyak ahli. Pemerintah biasanya menjabarkan kebijakannya dalam aturan atau peraturan perundang-undangan sehingga memiliki aspek paksaan dan dapat dipaksakan.

2.5 Efektivitas Program Kartu Pra-Kerja

2.5.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus ilmiah populer, efektivitas didefinisikan sebagai penggunaan yang tepat, penggunaan, atau dukungan tujuan. Efektivitas merupakan faktor terpenting dalam mencapai tujuan atau target yang ditetapkan untuk setiap organisasi, kegiatan, atau program. Dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran yang diinginkan terpenuhi. (Rosalina, 2012)

Efektivitas menurut (Lalompoh; Pangkey dan Rares, 2019) berpendapat bahwa ada perbedaan antara efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan fokus pada pencapaian hasil yang besar dan memiliki dampak dengan jumlah pengorbanan atau upaya sesedikit mungkin. Berbeda dengan efektivitas, yang lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai tanpa memperhatikan jenis pengorbanan yang harus dilakukan..

Menurut (Steers, 1984;44) Efektivitas adalah jenis jangkauan bisnis dari suatu program sebagai sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan sumber daya tersebut dan memberikan tekanan yang tidak semestinya pada proses implementasi. (Grace J. Waleleng Natasya Imanuela Memah; Joyce J. Rares, 2022:247–54)

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.5.2 Pengertian Kartu Pra-Kerja

Menurut Perpres nomor 36 tahun 2020 ialah, adanya program kartu pra-kerja ini masyarakat bisa meningkatkan kompetensi dalam bekerja agar lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah disediakan oleh program pemerintah salah satunya ialah program kartu prakerja. (Djaman, n.d.)

Pada peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Tujuan program Kartu Prakerja adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta menumbuhkan kewirausahaan. Kartu prakerja dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK, pekerja/buruh yang perlu meningkatkan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang di-PHK, dan bukan pencari nafkah,

termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, selain pencari kerja. Selama pandemi Covid-19, program kartu prakerja berfungsi sebagai bantuan sosial untuk memitigasi dampak Covid-19. Peraturan Menteri mengatur ketentuan tambahan mengenai bantuan sosial dan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan. Ini mengatur koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pelaksanaan pemerintahan sektor ekonomi. Apabila penerima Kartu Prakerja dengan sengaja memalsukan identitas dan/atau data pribadinya, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana, yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Djaman, 2019)

Menurut Perpres nomor 11 tahun 2020 peraturan menteri koordinator bidang perekonomian (Permenko Perekonomian) tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Permenko ini mengatur pengelolaan Kartu Prakerja, yang meliputi antara lain penerima kartu, mekanisme distribusi kartu, pelatihan penerima manfaat, lembaga pelatihan, platform digital, dan pelaksanaan program Kartu Prakerja di masa pandemi Covid-19. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan

secara berkala atau sesuai kebutuhan selama pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja. (Priatna, 2020)

Menurut Menteri Ketenagakerjaan dilansir dari website prakerja.go.id, Program Kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Program ini memberikan bantuan intensif kepada penerima manfaat berupa biaya pelatihan agar mempermudah para pencari kerja maupun pekerja yang mengalami PHK agar dapat bersaing kembali setelah keterampilan dan kemampuan mereka dikembangkan melalui insentif dan biaya pelatihan tersebut. Pengemasan kartu prakerja ini dapat bermanfaat bagi sektor swasta serta menjadi nilai tambah bagi masyarakat maka dari itu program ini merupakan wujud dari Kerjasama pihak swasta dengan pemerintah dalam menciptakan Indonesia Jaya dengan SDM unggul dalam bungkus Kerjasama Gotong royong. (Yasserina Rawie; Palupi Lindiasari Samputra, 2020).

Program Kartu prakerja tidak hanya sebagai program bantuan yang hanya memberikan bantuan berupa uang kepada penerimanya, sekaligus program yang mendidik masyarakat agar tidak selalu mengharap uluran tangan dari pemerintah, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan seharusnya mampu menjadikan masyarakat lebih mandiri dan mejadi batu loncatan agar memiliki kehidupan lebih baik lagi. Program Kartu Pra-kerja ini juga bisa

diartikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan stimulus untuk perbaikan sumber daya manusia yang merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku yang sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

2.5.3 Tujuan Program Kartu Pra-Kerja

Program kartu pra kerja juga bertujuan untuk mengasah kemampuan masyarakat agar diprioritaskan di dunia kerja sehingga dapat meningkatkan peluang karir. Program kartu pra kerja bukan hanya program bantuan tunai bagi penerimanya, tetapi juga merupakan program untuk mengedukasi masyarakat agar tidak selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Dengan adanya pelatihan yang diberikan akan mampu menjadikan masyarakat lebih mandiri dan menjadi batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk merespon dampak dari Covid-19, Program kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. (Kemenko Perekonomian, 2020)

2.5.4 Manfaat Program Kartu Prakerja

Menurut (Priatna, 2020) Program kartu pra-kerja ini memiliki manfaat untuk masyarakat:

1. Program ini diberikan kepada orang pencari kerja atau buruh yang terkena PHK.
2. Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan. Pada pelatihan tersebut bertujuan untuk pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau alih Kompetensi Kerja.
3. Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan Pelatihan. Insentif ini bertujuan untuk meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

2.5.5 Syarat Program Kartu Pra-Kerja

Adapun syarat dalam mengikuti program kartu pra-kerja yaitu:
(Kartu Prakerja, n.d.)

- a) Warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas.
- b) Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
- c) Pekerja atau buruh yang sedang mencari kerja, terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pelaku UMKM.
- d) Tidak menerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19.
- e) Bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan

perangkat desa, serta direksi/komisaris/dewan BUMN atau BUMD.

- f) Maksimal 2 nomor induk kependudukan (NIK) dalam satu kartu keluarga (KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.

2.5.6 Tahapan Program Kartu Pra-Kerja

Adapun tahapan-tahapan program kartu prakerja, yaitu:

- a) Pendaftaran
- b) Seleksi
- c) Pilih pelatihan
- d) Ikuti Pelatihan
- e) Beri ulasan dan rating
- f) Insentif pasca pelatihan
- g) Insentif pasca survey pekerjaan

2.6 Pelatihan

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. (UUD No. 31 tahun 2006)

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Tahun 2003, Training kerja di lakukan dan bertujuan untuk memperlengkap, meningkatkan kapabilitas kerja untuk tingkatan kapabilitas, keproduktifan, dan juga

kesejahteraan. Maksud training dan peningkatan SDM pada intinya di kelompokkan menjadi lima bagian:

- 1) Membenahi Performa,
- 2) Memutakhirkan keterampilan dan beberapa pekerja searah dengan perkembangan teknologi,
- 3) Kurangi waktu evaluasi untuk pegawai baru, agar berprofesional dalam suatu pekerjaan,
- 4) Menolong memecahkan permasalahan operasional,
- 5) Menyiapkan pegawai untuk promo.

Menurut (Simamora, 2006:141) Pelatihan adalah proses perubahan sistematis perilaku karyawan dalam suatu arah, guna untuk meningkatkan tujuan organisasional.

Menurut (Gomes, 2003:197) pelatihan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Menurut istilah pelatihan sering disamakan dengan istilah pengembangan, perbedaannya ialah pelatihan langsung terkait dengan performansi kerja pada pekerjaan yang sekarang. Sedangkan pengembangan tidaklah harus, pengembangan mempunyai wawasan yang lebih luas jika dibandingkan dengan pelatihan.

Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin di

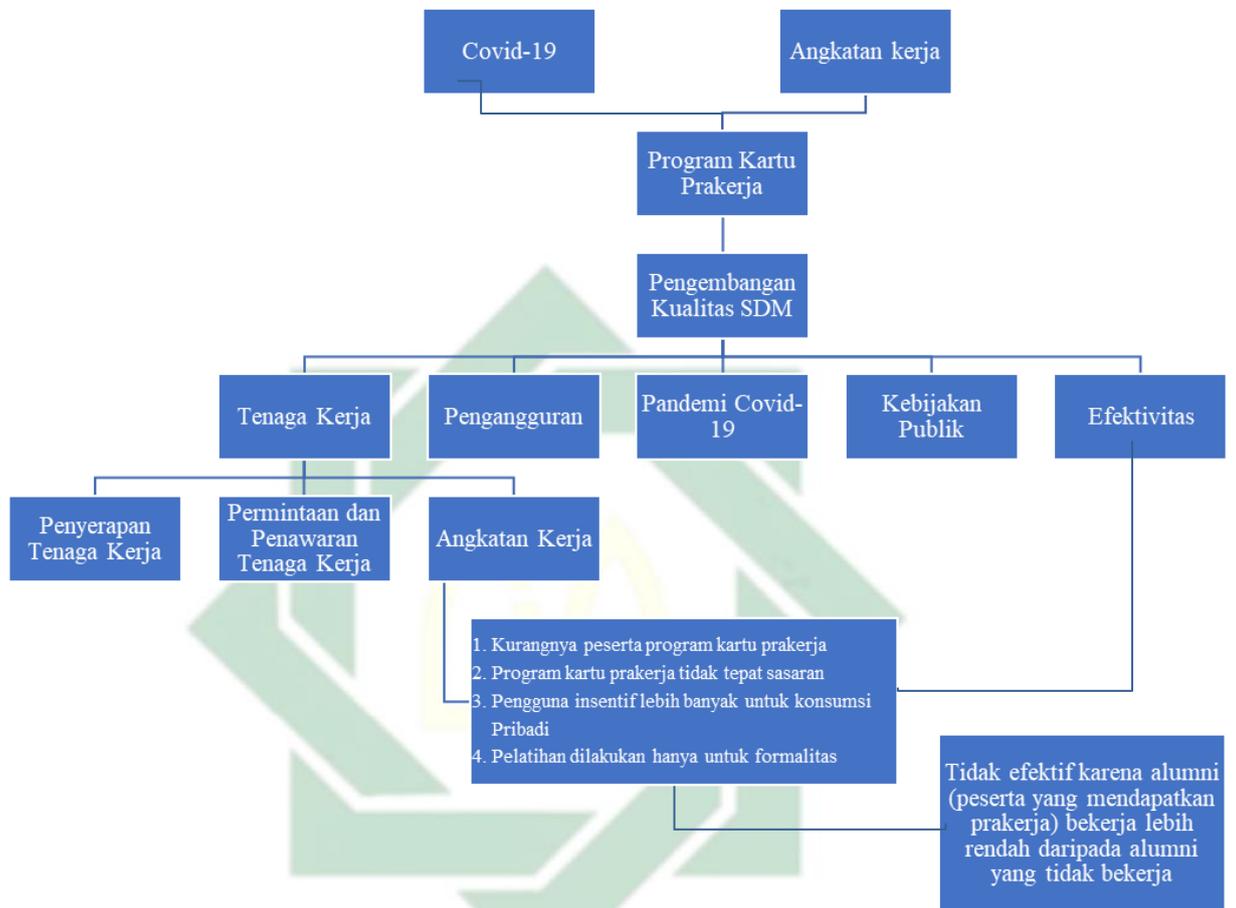
capai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam suatu jabatan atau fungsi saat ini.

Sedangkan Menurut (Handoko, T, 2005:112) Pelatihan adalah suatu usaha untuk memperbaiki penguasaan berbagai ketrampilan dan juga teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin.

Dengan demikian pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Program pelatihan adalah kumpulan program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Efektivitas program pelatihan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan apakah program pelatihan dilakukan secara efektif atau tidak untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

2.7 Kerangka Konseptual

Dari **gambar 2.2** dapat diketahui bahwa Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Program Kartu Prakerja didorong dalam upaya peningkatan keterampilan dan pengurangan angka pengangguran, yaitu dimana keefektivitas program tersebut akan memiliki output yaitu adanya penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya.



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Karena peneliti dilakukan dalam kondisi alami, metode penelitian kualitatif juga dikenal sebagai metode penelitian naturalistik (pengaturan alami). Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji kondisi objek yang alamiah (berbeda dengan eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif merupakan makna yang menekan daripada generalisasi. (Sugiyono, 2015)

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki dan memahami gejala sentral. Peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas untuk lebih memahami gejala-gejala sentral ini. Data yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data tersebut kemudian dianalisis dalam bentuk kata atau teks. Temuan analisis dapat berbentuk penggambaran atau deskripsi, atau dapat berbentuk tema. (Sugiyono, 2010)

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dilakukan di sekitar kota Surabaya. Adapun untuk beberapa data yang di ambil merupakan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ekonomi (PPID Kemenko), yang mulai dari bulan Februari - bulan Agustus melalui Email, dan juga data dari BPS Kota Surabaya melalui website dan Email. Sedangkan peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang pernah mendaftar program kartu pra-kerja di Kota Surabaya untuk memperoleh data yang dihasilkan melalui observasi langsung dilapangan.

3.3 Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah informasi yang dicari dan diperoleh secara langsung dari sumber asli oleh peneliti melalui wawancara. Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan kumpulan data yang berisi data penelitian utama yang dikumpulkan dari wawancara dengan narasumber masyarakat yang telah mendaftar untuk Program Kartu Prakerja.

Pemilihan informasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara *snowball sampling* (berkembang terus) yaitu informasi kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang

akan diteliti untuk melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk akan menunjuk orang lain bila keterangannya yang diberikan kurang memadai begitu seterusnya, dan proses ini akan berhenti jika data yang digali diantara narasumber satu dengan lainnya yang ada kesamaannya, sehingga data dianggap cukup dan tidak ada yang baru. Bagi peneliti hal ini juga berguna terhadap validitas data yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat yang telah mendaftar program kartu prakerja.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, atau melalui media perantara (data yang dapat diperoleh dari pihak lain), penelitian sebelumnya, dan studi pustaka dimana data tersebut sebelumnya ada. Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Data tambahan dapat diperoleh dari website bps Kota Surabaya, serta data program kartu pra-kerja yang diperoleh dari website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ekonomi (PPID Kemenko), dan dokumen terkait penelitian ini, serta foto-foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk mendukung metode penelitian tersebut, penelitian yang diajukan merupakan

teknik pengumpulan data untuk masalah yang terkait dengan penelitian.
(Sugiyono, 2010)

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa metode, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar, dimana penelitian tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi:

3.4.1 Observasi

Menurut (Sugiyono, 2015) tahap pertama dan terpenting dari suatu penelitian adalah observasi, yaitu kegiatan observasi yang dilakukan sebelum diperoleh data yang lebih mendalam. Para peneliti berharap dapat melihat dan mengamati secara langsung pada situasi aktual dengan melakukan pengamatan. Dan peneliti dapat mempelajari situasi dan kondisi objek yang diteliti secara langsung.

Menurut (Sanafiah Faisal, 1990) ada beberapa macam observasi, ialah observasi partisipasi, observasi terus terang atau tersamar dan observasi takberstruktur. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan Observasi TerusTerang atau Tersamar sebagaimana peneliti yang melakukan pengumpulan data memberi tahu sumber data secara langsung bahwa ia sedang melakukan penelitian. Akibatnya, mereka yang sedang diteliti menyadari aktivitas peneliti dari awal hingga akhir. Namun, dalam konteks di

mana peneliti tidak langsung atau menyamar dalam pengamatan, ini untuk menghindari data yang masih dirasiskan. Kemungkinan jika dilakukan secara jujur, peneliti akan dilarang melakukan pengamatan.

Peneliti menggunakan Observasi Terus Terang atau Tersamar, yang bertujuan sebagai peneliti untuk mengumpulkan data dan juga untuk menyatakan secara jujur kepada sumber data. Penggunaan pengamatan yang terus terang atau tersamar juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengamatan peneliti untuk menghindari jika masih ada data rahasia.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk membangun makna dalam topik tertentu. Metode wawancara menjadi pilihan populer dalam penelitian kualitatif karena diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih detail, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. (Sugiyono, 2015)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak mengikuti pedoman wawancara tertulis secara sistematis dan komprehensif untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara hanya menguraikan pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti akan mewawancarai para narasumber yang pernah

mendaftar kartu prakerja dan juga peserta yang lolos pada program kartu prakerja.

Kegiatan wawancara yang peneliti lakukan ialah wawancara yang dilaksanakan secara langsung dengan para peserta yang pernah mendaftar kartu prakerja dan juga peserta yang lolos kartu prakerja. Wawancara pada para narasumber ialah berkaitan dengan proses pendaftaran kartu prakerja, alasan mengikuti kartu prakerja, kegunaan uang insentif dari kartu prakerja, dan juga semua data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang secara rinci dan komprehensif untuk pengumpulan data. Fleksibilitas munculnya pertanyaan mendalam terbatas dan tergantung pada kemahiran pewawancara, pembukaan wawancara, dan situasi wawancara karena diharapkan dengan menggunakan jenis wawancara ini, data yang diperoleh akan lebih fokus dan terarah. Namun, peneliti masih dapat mengajukan pertanyaan tambahan yang lebih mendalam untuk melengkapi data yang diperoleh berdasarkan kondisi pada saat wawancara.

Peneliti mewawancarai masyarakat yang telah mendaftarkan diri pada program kartu prakerja. Untuk kriterianya ialah sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh yang terkena PHK,

2. Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
3. Sebagai warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
4. Peserta tidak bekerja sebagai pejabat, ataupun lainnya.
5. Peserta yang tidak menerima bantuan sosial lainnya.

Dengan begitu peneliti tahu bahwa program kartu prakerja tidak semua masyarakat langsung diterima atau lolos, dan peserta yang lolos masih berlanjut ke tahap berikutnya. Adapun masyarakat yang telah berpartisipasi mendaftar program kartu prakerja di Kota Surabaya mencapai 401.141 orang. Sedangkan masyarakat/peserta yang lolos mendapatkan program kartu prakerja mencapai 126.199 orang penerima. Dari sekian banyaknya peneliti mewawancarai narasumber hanya 16 orang yang telah mendaftar program kartu prakerja. Dimana dari 16 narasumber tersebut yang telah lolos ada 13 narasumber peserta kartu prakerja.

Semua kebijakan Kartu Prakerja dirumuskan oleh Komite Cipta Kerja yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Staf Kepresiden sebagai Wakil Ketua, terdiri dari 12 (dua belas) menteri dan kepala lembaga sebagai

anggota dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretaris Komite.

Dengan adanya beberapa kriteria peneliti mewawancarai orang-orang yang telah mengambil bagian dalam program kartu pra-kerja. Hal ini diharapkan dapat memperkuat informasi dan data yang relevan dan benar terkait efektivitas program kartu prakerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Surabaya di masa pandemi Covid-19.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendorong pengumpulan data dan mendukung teknik wawancara. Dalam penelitian kualitatif, analisis dokumentasi digunakan selain metode wawancara.

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang berupa email dari PPID, BPS Kota Surabaya, dan juga Whatsapp dari petugas BPS Surabaya, yang diperlukan terkait dengan masalah yang sedang diselidiki untuk mendukung dan membuktikan suatu masalah. Dokumen ini juga dapat memberikan informasi kepada peneliti, terutama data yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dokumen yang akan dipresentasikan dalam penelitian ini akan berupa dokumen yang

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu foto yang diambil sendiri oleh peneliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2012) teknik analisis data dalam jenis penelitian kualitatif ini adalah proses menemukan dan mengatur data secara sistematis yang diperoleh dari observasi, wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, mengaturnya menjadi pola, memutuskan mana yang penting dan harus dipelajari, serta menarik kesimpulan. Analisis data penelitian ini meliputi:

3.5.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan sangat luas, Semakin lama peneliti berada di lapangan, juga semakin banyak data yang akan peneliti kumpulkan. Reduksi data akan menyortir data yang dikumpulkan di lapangan sesuai dengan fokus penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk menentukan data dasar dan menarik kesimpulan.

Reduksi data merupakan analisis penajaman yang mengatur data sehingga kesimpulan dapat diverifikasi dan digunakan sebagai temuan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti. Karena fokus utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Tujuan penelitian yang harus dipenuhi akan memandu kegiatan reduksi data. (Sugiyono, 2015)

3.5.2 Klasifikasi Data

Proses klasifikasi data merupakan pemisahan data yang heterogen ke dalam kelompok data yang homogen, sehingga sifat-sifat data yang menonjol mudah dilihat. Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan sifat yang sama ke dalam kelas tertentu, mempermudah dalam membandingkan data yang ada mengelompokkan data yang menonjol. Misalnya pendidikan lolos tidaknya program kartu prakerja, dan alasan lolos tidaknya program kartu prakerja.

3.5.3 Modifikasi Data

Setelah proses pengumpulan data, peneliti dapat melakukan analisis untuk mengetahui informasi yang diinginkan. Namun tidak semua data dapat dianalisis. Data masih perlu dimodifikasi agar sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk keperluan analisis penelitian mengelompokkan narasumber berdasarkan umur, status dan output yang mereka dapatkan dari hasil program kartu prakerja. Pengelompokan umur dimodifikasi berdasarkan usia remaja akhir dan dewasa. Status keaktifan menjadi kerja atau tidak bekerja dan output program kartu prakerja yang dapat langsung dianalisis.

3.5.4 Penyajian Data

Penyajian data penelitian akan menyusun data secara metodelis. Sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian ini

tidak akan diekspos secara keseluruhan. Peneliti akan menganalisis data yang mana dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan dalam penelitian melalui penyajian data. Data dapat disajikan dalam teks, bagan, jaringan, grafik, atau matriks dengan menggabungkan informasi yang diperoleh secara terpadu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan memfasilitasi kesimpulan berdasarkan situasi aktual. Teks naratif sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data penelitian. (Sugiyono, 2015)

3.5.5 Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan dapat menggambarkan objek yang diteliti dengan menjawab semua pertanyaan penelitian. Upaya penarikan dapat dilakukan oleh peneliti selama di lapangan, melakukan penelitian, dan sampai akhir proses penelitian. Kesimpulan sementara dapat diuji ulang menggunakan data dari lapangan, dengan tujuan memperoleh kebenaran ilmiah. Sebagai laporan dalam penelitian ini, menarik kesimpulan dapat bersifat deskriptif. Menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal dan untuk mendukung temuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang sebelumnya tidak ada. Penemuan itu sendiri dapat berupa deskripsi atau deskripsi objek. (Sugiyono, 2015)

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN DATA PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kota Surabaya

Kota Surabaya Merupakan kota besar sekaligus termasuk ibu kota Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi perlu diperhatikan terkait program kartu prakerja terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya. Berikut gambaran umum mengenai kota Surabaya:



Sumber: website Surabaya kota, 2018.

Gambar 4. 1 Peta Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, terletak di pantai utara provinsi, tepatnya antara $7^{\circ} 9' - 7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 54'$ Bujur Timur. Wilayahnya dibatasi di sebelah utara dan timur oleh Selat Madura, di sebelah selatan oleh Kabupaten Sidoarjo, dan di sebelah barat oleh Kabupaten Gresik. Surabaya memiliki total luas wilayah 52.087 hektar, dengan luas daratan 33.048

hektar (63,45%) dan luas laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar 19.039 hektar (36,55%). Surabaya merupakan 80% dataran rendah, dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut, kecuali dua bukit landai di daerah Lidah (Kecamatan Lakarsantri) dan Gayungan, yang memiliki ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut. Jenis batuan yang ada dibagi menjadi empat kategori, yang masing-masing terdiri dari unit tanah liat atau pasir. Sebagian besar tanah adalah aluvial, dengan sisanya adalah tanah dengan kandungan kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Surabaya, seperti daerah tropis lainnya, mengalami dua musim: hujan dan kering.

Selain menjadi ibu kota provinsi Jawa Timur, kota Surabaya ini yang dijuluki dengan Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan jasa. Kota Surabaya ini juga menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia timur. Penduduk di kota Surabaya sangat majemuk, seperti ada berbagai suku dan agama yang hidup dengan aman, nyaman, dan damai. Diantaranya berbagai suku ialah ada suku jawa, suku madura, suku tionghoa, suku arab dan juga ada warga asing. Sedangkan untuk agama, di kota Surabaya mayoritas agama islam.

Adanya sistem bagian administrasi pemerintahan Kota Surabaya yang dikepalai oleh Walikota juga memberikan koordinasi atas wilayah bagian administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat.

Tabel 4. 1 Jumlah Kecamatan di Kota Surabaya

No.	Kecamatan	No.	Kecamatan
1.	Asemrowo	17.	Pakal
2.	Benowo	18.	Rungkut
3.	Bubutan	19.	Sambikerep
4.	Bulak	20.	Sawahan
5.	Dukuh Pakis	21.	Semampir
6.	Gayungan	22.	Simokerto
7.	Genteng	23.	Sukomanunggal
8.	Gubeng	24.	Sukolilo
9.	Gunung Anyar	25.	Tambaksari
10.	Jambangan	26.	Tandes
11.	Karangpilang	27.	Tegalsari
12.	Kenjeran	28.	Tenggilis Mejoyo
13.	Krembangan	29.	Wiyung
14.	Lakarsantri	30.	Wonocolo
15.	Mulyorejo	31.	Wonokromo
16.	Pabean Cantikan		

Pada **Tabel 4.1** menjelaskan beberapa jumlah kecamatan di kota Surabaya ialah 32 Kecamatan terdiri dari 163 kelurahan dan juga 1.360 RW (Rukun Warga) dan 1.907 RT (Rukun Tetangga). Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Benowo, yaitu sekitar 23.73 km². Sedangkan yang paling kecil adalah kecamatan dengan Simokerto luas wilayah 2.59 km². Batas wilayah kota Surabaya antara lain:

1. Surabaya bagian utara: Selat Madura
2. Surabaya bagian Timur: Selat Madura dan Laut Jawa

3. Surabaya bagian Selatan: Kabupaten Sidoarjo
4. Surabaya Bagian Barat: Kabupaten Gresik

4.1.2 Letak Demografis

a. Kependudukan

Surabaya sebagai kota metropolitan menjadi destinasi bagi warga lain untuk mencoba peruntungan. Hal inilah yang mendorong pertumbuhan penduduk terus berlanjut. Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2021 sebanyak 2,88 juta jiwa. Kota Surabaya pada tahun 2021 memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,28 persen. Sementara itu, rasio jenis kelamin Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 98. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Peningkatan jumlah penduduk bukan semata-mata karena kelahiran, tetapi juga karena imigran yang tinggal di Surabaya. Peningkatan jumlah penduduk tidak semata-mata karena ketersediaan lapangan kerja.

Data penduduk di kota Surabaya yang diperoleh berdasarkan jenis kelamin menurut badan pusat statistika (BPS) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Surabaya

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.427.872 Jiwa
Perempuan	1.452.412 Jiwa
Total Keseluruhan	2.880.284 Jiwa

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan

Dari **Tabel 4.2** diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Surabaya merupakan kota dengan penduduk terbanyak diantara kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya berdasarkan jenis kelamin yaitu 2.880.284 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.427.872 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 1.452.412 jiwa. Bisa dilihat dari tabel dia atas, penduduk perempuan yang paling banyak dari pada penduduk laki-laki.

b. Pendidikan

Dibawah ini merupakan tabel yang menjelaskan jumlah pendidikan yang ada di Kota Surabaya yang terdiri dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, antara lain:

Tabel 4. 3 Jumlah Sekolah di Kota Surabaya

Tingkat Pendidikan	Sekolah		Jumlah
	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	
SD	285	365	650
SMP	63	259	322
SMA	22	118	140
Jumlah Keseluruhan			1.112

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sistem Data Pokok Pendidikan

Dari **Tabel 4.3** maka dapat diketahui bahwa ada banyak sekolah di Surabaya, mulai dari SD hingga SMA. Secara umum, keberadaan sekolah yang disebutkan di atas adalah untuk siswa dengan kebutuhan normal dan khusus. Setiap sekolah yang ada di Surabaya digunakan untuk menambah pengetahuan dan kreativitas generasi penerus.

c. Sosial Masyarakat

Kota Surabaya memiliki lokasi yang sangat strategis, hampir di tengah-tengah Indonesia dan tepat di bagian selatan Asia, menjadikannya salah satu kota penting untuk kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Surabaya adalah pusat komersial, industri, keuangan, dan bisnis Provinsi Jawa Timur. Mayoritas penduduk di Surabaya terlibat dalam industri, perdagangan, dan jasa setiap hari.

Surabaya dibedakan oleh beragam industri mapan, yang semuanya membutuhkan banyak pekerja. Karena banyaknya

industri, maka mempengaruhi mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai pekerja industri. Surabaya memiliki UMK (City Minimum Wage) tertinggi di wilayah Jawa Timur, dan kota ini memiliki banyak sektor industri yang mapan. Industri Surabaya juga beragam, mulai dari usaha kecil hingga korporasi besar.

Tabel 4. 4 Banyaknya Industri Besar dan Sedang

No.	Golongan Industri	Besar	Kecil	Jumlah
1.	Ind. Makanan dan Minuman	67	48	115
2.	Ind. Pengolahan Tembakau	7	3	10
3.	Ind. Tekstil	9	10	19
4.	Ind. Pakaian Jadi	10	13	23
5.	Ind. Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	16	12	28
6.	Ind. Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	25	16	41
7.	Ind. Kertas dan Barang dari Kertas	12	5	17
8.	Ind. Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	25	19	44
9.	Ind. Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	1	1	2
10.	Ind. Bahan Kimia dan Barang dari bahan kimia	30	21	51
11.	Ind. Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	10	3	13
12.	Ind. Karet dan Barang dari karet dan plastik	46	52	98

13.	Ind. Barang Gallan bukan Logam	13	16	29
14.	Ind. Logam Dasar	15	9	24
15.	Ind. Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya	33	28	61
16.	Ind. Komputer, Barang Elektronik dan Optik	8	6	14
17.	Ind. Peralatan Listrik	15	10	25
18.	Ind. Mesin dan Perlengkapan ytdl	9	17	26
19.	Ind. Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	10	7	17
20.	Ind. Alat Angkutan Lainnya	5	5	10
21.	Ind. Furnitur	14	17	31
22.	Ind. Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	15	3	18
23.	Ind. Pengolahan Lainnya	20	24	44
Jumlah		415	345	760

Sumber: Direktori Industri Manufaktur Kota Surabaya 2021.S.Si Nurcholis, Direktori Industri Manufaktur Kota Surabaya, Badan Pusat Statistik (Surabaya, 2021).

4.2 Realisasi Program Kartu Prakerja

4.2.1 Awal Terbentuk Program Kartu Pra-Kerja

Program ini pertama kali diperkenalkan oleh presiden Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu sembako murah.

Program ini bersama KIP Kuliah dan kartu sembako murah ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres Indonesia 2019. Selama pandemi Covid-19,

pemerintah mengubah Kartu Prakerja menjadi program bantuan sosial untuk membantu pekerja PHK dan mereka yang baru saja lulus dari pendidikan formal. Anggaran itu digandakan menjadi Rp 20 triliun untuk memperluas cakupan bantuan. Pelatihan yang sebelumnya memiliki dua skema yaitu online dan langsung ini telah berubah total menjadi online. Pemerintah berharap dengan diterbitkannya Kartu Prakerja pada April 2020 akan memberikan manfaat dan solusi melalui kartu prakerja seperti:

- 1) Membantu mengurangi biaya pelatihan yang ditanggung oleh pekerja dan perusahaan;
- 2) Mampu mengurangi biaya dalam mencari informasi pelatihan;
- 3) Mendorong lapangan kerja dengan mengurangi ketidakcocokan;
- 4) Membuat suplemen untuk pendidikan formal Melalui program kartu prakerja ini, peserta yang lolos juga akan mendapatkan uang.

Adapun total yang didapatkan sebesar Rp3.550.000 dengan bentuk antara lain:

- 1) biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000.
- 2) biaya Insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000/bulan selama 4 bulan.
- 3) Insentif survei keberkerjaan dengan total Rp150.000.

4.2.2 Tujuan Kartu Prakerja

Program kartu pra kerja juga bertujuan untuk mengasah kemampuan masyarakat agar diprioritaskan di dunia kerja sehingga dapat meningkatkan peluang karir. Program kartu pra kerja bukan hanya program bantuan tunai bagi penerimanya, tetapi juga merupakan program untuk mengedukasi masyarakat agar tidak selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Dengan adanya pelatihan yang diberikan akan mampu menjadikan masyarakat lebih mandiri dan menjadi batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk merespon dampak dari Covid-19, Program kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. (Kemenko Perekonomian, 'Program Kartu Prakerja', 2020, 17).

4.2.3 Syarat Kartu Prakerja

Adapun syarat dalam mengikuti program kartu pra-kerja yaitu:
(*Syarat Ketentuan / Kartu Prakerja*, n.d.)

- 1) Warga Negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas.
- 2) Tidak mengejar pendidikan formal saat ini.
- 3) Pekerja atau pekerja yang mencari pekerjaan, yang telah diberhentikan atau dirumahkan, atau yang perlu meningkatkan kompetensi kerjanya, termasuk pelaku UMKM.

- 4) Tidak menerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19.
- 5) Bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta (direksi/komisaris/ dewan BUMN atau BUMD).
- 6) Maksimal 2 nomor induk kependudukan (NIK) dalam satu kartu keluarga (KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.

4.2.4 Tahapan Kartu Prakerja

Proses tahapan program kartu pra-kerja antara lain:

- 1) Masyarakat mendaftarkan diri ke website prakerja.go.id
- 2) Setelah lolos dalam pendaftaran kartu prakerja, pesertan akan mendapatkan insentif sebesar Rp 1.000.000 untuk biaya pelatihan kompetensi dan keterampilan pekerja (adapun kalau ada sisa dari biaya pelatihan tersebut uangnya tidak bisa di cairkan).
- 3) Setelah melakukan pendaftaran, peserta melakukan tes motivasi dan kemampuan dasar (yang bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh peserta).
- 4) Pilih pelatihan yang peserta inginkan (pastikan peserta mengikuti dan menyelesaikan kelas pelatihan yang dipilih oleh peserta). Dalam pelatihan pada Program Kartu Prakerja

menggunakan beberapa platform, antara lain website dan telegram.

- 5) Ikuti pelatihan yang sudah dipilih, maka setelah mengikuti pelatihan beri penilaian dan ulasan.
- 6) Setelah itu peserta akan mendapatkan sertifikat dari kelas pelatihan yang telah di pilih.
- 7) Tahapan terakhir peserta yang sudah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya mendapatkan insentif biaya mencari kerja sebesar Rp600,000/bulan selama 4 bulan.

4.2.5 Manfaat Kartu Prakerja

Program kartu pra-kerja ini memiliki manfaat untuk masyarakat:

- 1) Program ini diberikan kepada orang pencari kerja atau buruh yang terkena PHK.
- 2) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan. Pada pelatihan tersebut bertujuan untuk pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau alih Kompetensi Kerja.
- 3) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan Pelatihan. Insentif ini bertujuan untuk meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

4.3 Program Kartu Prakerja di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi

Tantangan bagi tenaga kerja Indonesia adalah 63% lulusan pendidikan formalnya tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia pada tahun 2030-2040, dan mismatch antara lapangan pekerja yang tersedia dan tenaga kerja yang tersedia, tingginya angka pengangguran muda, dan budaya pelatihan di Indonesia yang masih rendah. Hal ini karena pelatihan dan pendidikan bukan merupakan prioritas utama perusahaan, di sinilah fungsi Program Kartu Prakerja untuk mengisi kekosongan sebagai jembatan sebelum memulai karier maupun pindah agar ada peningkatan keterampilan dan relevansi untuk bekerja maupun berwirausaha. Sejumlah manfaat yang didapat dari Program Kartu Prakerja yakni: (1) Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan; (2) Mengurangi biaya dalam mencari informasi mengenai pelatihan; (3) Mendorong keberkerjaan seseorang melalui pengurangan mismatch; (4) Menjadi komplemen dari Pendidikan Formal; dan (5) Membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat Covid-1. (Panjaitan et al., 2021)

Pada pandemi Covid-19 masih memengaruhi kondisi terhadap beberapa bidang pada perekonomian Indonesia dan juga berimbas terhadap ketenagakerjaan. Salah satunya sektor yang terkena dampak ialah pada sektor ketenagakerjaan. Tidak sedikit karyawan yang mendapatkan pengurangan jam kerja dan ada juga yang harus kehilangan pekerjaan bisa di katakan terkena PHK. Adanya Pandemi Covid-19 pemerintah

menegaskan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait tentang Covid-19 ialah UUD No. 15 tahun 2021 yang berisi tentang “Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19”.

Adanya PPKM juga mengakibatkan perekonomian masyarakat menurun, maka dari itu pemerintah mengusahakan agar masyarakat tidak merasa kekurangan. Dengan begitu pemerintah mengeluarkan salah satu program yang akan membantu masyarakat yang kesulitan dalam perekonomian sehari-harinya, ialah Program Kartu Pra-Kerja. Program kartu prakerja merupakan program pemerintah yang program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Maka dari itu masyarakat Indonesia mendaftarkan diri pada program kartu prakerja agar mempermudah untuk mencari pekerjaan dan juga mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Pemerintah sangat berantusias pada program tersebut, dikarenakan program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.

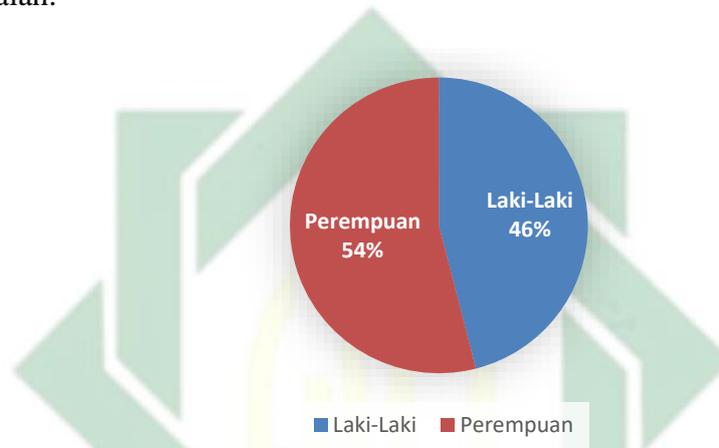
Program Kartu Prakerja telah mendapatkan perhatian besar dari masyarakat pada masa pandemi Covid-19, terbukti bahwa 75 juta orang yang mendaftar sejak pertama kali program ini diluncurkan pada tahun 2020 lalu. Melalui Program Kartu Prakerja, pemerintah telah menyalurkan dana insentif sebesar Rp13,36 triliun pada tahun 2020 dan untuk tahun ini sebesar Rp9,42 triliun juga telah disalurkan sebagaimana data tersebut sudah tercatat per Oktober 2021. Program Kartu Prakerja sangat inklusif telah menjangkau peserta pendaftar berada di 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan jumlah penerima setiap provinsi mayoritas mengalami peningkatan setiap gelombangnya.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penerima Program Kartu Prakerja yang meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dan berdasarkan jumlah penerima, berada di posisi ke-2 nasional. Dari 34 gelombang yang dibuka sejak April 2020, Program Kartu Prakerja telah dirasakan manfaatnya oleh 13 juta peserta. Dari jumlah atau penerima manfaat itu, sebanyak 1.269.950 merupakan penerima efektif dari Jawa Timur. Sementara itu, Kota Surabaya adalah kota dengan jumlah penerima tertinggi di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penerima sebanyak 401.141 orang dan yang berhasil atau yang lolos mendapatkan kartu prakerja sebanyak 126.199 orang penerima (PPID Kemenko, 2022). Adapun data-data yang sudah dipaparkan dalam penjelasan diatas dan juga akan dibahas dibawah ini dari pusat Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Ekonomi (PPID Kemenko). Statistik penerima di Kota Surabaya antara lain:

a. Kategori Jenis Kelamin

Dibawah ini terdapat diagram yang lolos atau yang sudah mendapatkan kartu prakerja dan dikategorikan dalam jenis kelamin, ialah:



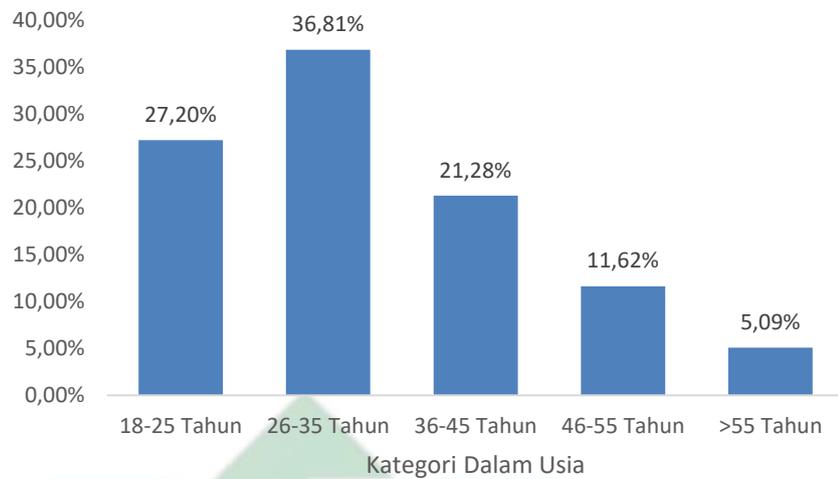
Sumber: Data Peneliti dari Kantor Pusat PPID Kemenko

Gambar 4. 2 Kategori Dalam Jenis Kelamin

Pada **Gambar 4.2** diatas menjelaskan bahwa kategori dalam jenis kelamin perempuan yang paling banyak lolos dalam pendaftaran program kartu prakerja di kota Surabaya sebesar 54% daripada kategori laki-laki yang sebesar 46%.

b. Kategori dalam Usia

Masyarakat yang lolos atau sudah mendapatkan kartu prakerja ini di kategorikan dalam usia. Maka dari itu, dibawah ini terdapat diagram batang untuk penjelasan data yang lebih jelas:

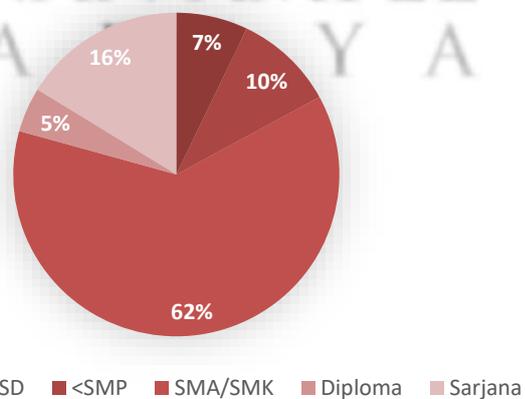


Sumber: Data peneliti dari Kantor Pusat PPID Kemenko

Gambar 4.3 Kategori dalam Usia

Dari **Gambar 4.3** menjelaskan bahwa pada umur 26-35 tahun kuantitas nya lebih banyak sebesar 36%, dimana orang yang mencari pekerjaan itu sekitar usia tersebut dan usia 26-35 itu termasuk usia produktif bekerja dan juga pada usia tersebut bisa membantu program kartu prakerja ini. Sedangkan pada usia 18-25 tahun sebesar 18% yang kuantitasnya masih di bawah dari usia 26-35 tahun.

c. Kategori dalam Pendidikan



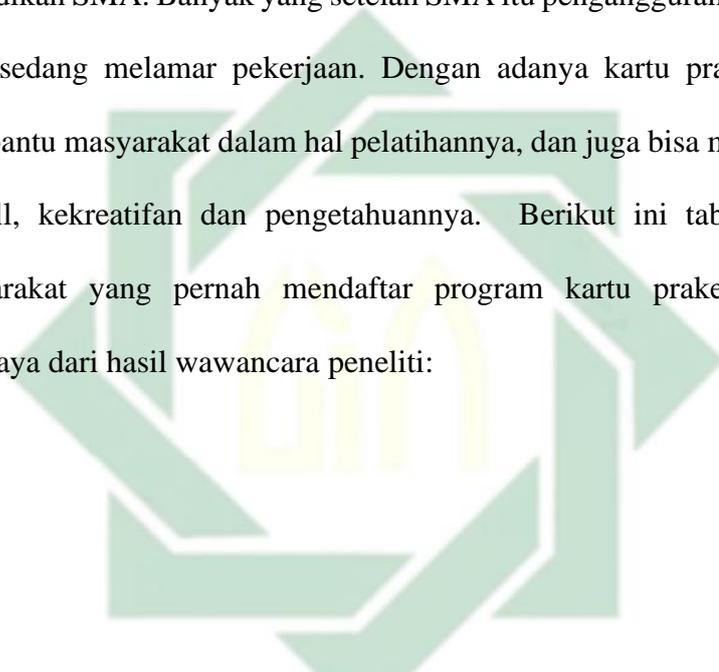
Sumber: Data Peneliti dari kantor pusat PPID Kemenko

Gambar 4. 4 Kategori dalam Pendidikan

Dari **gambar 4.4** menjelaskan bahwa kategori pendidikan yang lebih besar terdapat pada SMA/SMK sebesar 61,50%. Program kartu prakerja dimana bisa mendorong dan membantu masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dan di kota Surabaya terpantau masih banyak orang yang hanya bisa membiayai pendidikan hanya sampai SMA/SMK. Dengan begitu program tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat yang lulusan SMA/SMK, bisa langsung mendaftarkan diri ke program kartu prakerja dan juga masyarakat yang hanya lulusan SMA/SMK masih bisa bekerja, entah itu di perusahaan atau membuka usaha sendiri. Disitu nanti akan di berikan beberapa tahapan yang sampai mendapatkan sertifikat dan juga uang saku selama 4 bulan.

Masyarakat kota Surabaya saat mendaftarkan diri pada program kartu prakerja 88% dinyatakan menganggur, sedangkan 87% dinyatakan belum pernah mengikuti pelatihan. Selain itu hasil dari survey pada data yang telah di berikan oleh kantor pusat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Ekonomi (PPID Kemenko) terkait pelatihan yang diikuti bahwa 97% dinyatakan Program Kartu Prakerja meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan softkill dan 95% dinyatakan Program Kartu Prakerja mendorong kewirausahaan.

Pada **Tabel 4.5** menjelaskan bahwasannya masyarakat kota Surabaya banyak yang berpartisipasi mendaftarkan diri pada program kartu prakerja. Sekitar 88% yang mengikuti kategori dalam jenis kelamin perempuan, sedangkan 87% di ikuti kategori dalam jenis kelamin laki-laki. Dalam tabel tersebut di jelaskan dalam kategori dalam pendidikan paling banyak ialah Pendidikan SMA. Banyak yang setelah SMA itu pengangguran dan juga ada yang sedang melamar pekerjaan. Dengan adanya kartu prakerja sangat membantu masyarakat dalam hal pelatihannya, dan juga bisa meningkatkan softkill, kekreatifan dan pengetahuannya. Berikut ini tabel identitas masyarakat yang pernah mendaftar program kartu prakerja di Kota Surabaya dari hasil wawancara peneliti:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4. 5 Tabel Identitas Masyarakat yang Pernah Mendaftar Kartu Prakerja

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pend. Akhir	Gel.	Ket.	Alasan Lolos/Tidak Lolos	Status Setelah Pelatihan	
								Bekerja	Tidak Bekerja
1.	Dian Ratnasari	P	25	SMA	4	Lolos	Masuk dalam kaategori pencari kerja	Usaha online, makanan	
2.	Nurin Niswah	P	27	S1	8	Lolos	Masuk dalam kaategori pencari kerja	Guru	
3.	Mas Maulidah Sa'adatul A	P	21	SMA	3	Tidak	Pendaftaran sebagai penerima bantuan		Ibu Rumah tangga
4.	Arif Sholahuddin	L	20	SMA	3	Lolos	Masuk dalam kaategori pencari kerja		Tidak bekerja
5.	Munadi	L	47	SMA	4	Lolos	Terkena PHK	Jualan Mie Ayam	
6.	Sri Priharyani	P	45	SMA	3	Lolos	Terkena PHK		Ibu Rumah tangga
7.	M. Ach. Muhammad T	L	24	SMA	3	Lolos	Kurangnya seleksi dalam penyaringan peserta	Marketing	
8.	Luluk Nur R	P	20	Mahasi swa	1	Tidak			Tidak Bekerja
9.	Ainur Rohmaniyah	P	22	Mahasi swa	1	Tidak			Tidak Bekerja
10.	Johan Pranata	L	29	SMA	4	Lolos	Masuk dalam kaategori pencari kerja	Usaha Online	

11.	Dian Rusniawati	P	30	S1	5	Lolos	Terkena PHK	Pengasuh di yayasan	
12.	Misellia	P	22	SMK	3	Lolos	Masuk dalam kaategori pencari kerja	Usaha Online (Skincare) dan Toko	
13.	Andika	L	22	SMA	6	Lolos	Masuk dalam kaategori pencari kerja	Konten Kreator	
14.	Monalisa	P	32	S1	1	Lolos	Terkena PHK		Ibu Rumah Tangga
15.	Amak	L	18	SMA	3	Lolos	Masuk dalam kaategori pencari kerja		Tidak Bekerja
16.	Musyarrofah	P	30	S1	6	Lolos	Kurangnya seleksi dalam penyaringan peserta	Pegawai BNI	

Sumber: Data Peneliti hasil dari Wawancara Pada Peserta Kartu Prakerja

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dalam wawancara Kak Johan selaku peserta yang lolos dari program kartu prakerja mengatakan bahwa:

“Awalnya saya daftar itu karena lagi rame di instagram mbak, dan akhirnya saya mencoba daftar dan alhamdulillah gelombang ke-4 kali, dari waktu awal masuk itu sekali itu masih belum lolos, baru yang ke-4 saya lolos mbak. Program itu sangat membantu bagi saya mbak, bisa manambah pengetahuan, kekreatifan pokoknya manfaat lah mbak.”

Selain itu dalam wawancara kak Luluk selaku peserta yang pernah mendaftar pada kartu prakerja tetapi tidak lolo, mengatakan bahwa:

“Saya daftar prakerja itu mbak awalnya yah pengen tau gimana sih tahapan-tahapannya, tetapi waktu aku mendaftar pertama kali itu langsung tidak diterima, soalnya aku kan masih dalam pendidikan (sebagai mahasiswa) nah aku baru tau mbak kalau yang masih dalam pendidikan tidak bisa, sama aku ini udah kerja mbak di Pom Bensin Shell bagian administrasinya. Mungkin dari situ saya tidak lolos dari program kartu prakerja itu mbak”.

Dari **Tabel 4.5** yang telah dijabarkan, terdapat beberapa alasan lolosnya para pendaftar program prakerja tergantung dari individu/ peserta yaitu akibat kurang ketatnya seleksi yang dilakukan koordinator oleh program kartu prakerja, terdapat salah satu narasumber yang sebenarnya bukan kriteria pencari kerja karena telah memiliki pekerjaan sebelumnya yaitu narasumber yang bernama musarrofah yang memiliki pekerjaan

sebagai pegawai BNI, hal tersebut menjadikan program prakerja tidak tepat sasaran dalam pencarian peserta program. hal tersebut seharusnya dikaji lebih lanjut oleh pemerintah khususnya Komite Cipta Kerja yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dari pernyataan peserta yang mendaftar program kartu prakerja tersebut tidak semua peserta yang sekali mendaftar langsung lolos dan butuh beberapa kali baru lolos dan mendapatkan kartu prakerja. Sedangkan untuk yang tidak lolos itu dikarenakan masih menempuh pendidikan (Mahasiswa) dan juga tidak ada informasi ACC dari pihak pusat.



Sumber: Data peneliti dari Kantor Pusat PPID Kemenko

Gambar 4.5 Perbandingan Peserta Yang Lolos Seleksi Program Kartu Prakerja Di Kota Surabaya

Pada **Gambar 4.5** bahwa perbandingan peserta yang lolos seleksi Program Kartu Prakerja di Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar 126.199 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 9.749 jiwa. Dan bisa disimpulkan

bahwa mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu peserta yang lolos mengikuti program Kartu prakerja sangat meningkat. Dengan berjalannya waktu Program Kartu Prakerja tersebut sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan juga masyarakat mengikuti persyaratan-persyaratan Program Kartu Prakerja yang berlaku sampai akhirnya lolos. Jadi meningkatnya peserta yang lolos setiap tahun di kota Surabaya tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang sudah mengenal Program Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja sendiri awalnya tidak secara spesifik didesain untuk menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program Kartu Prakerja belum sempat diluncurkan, tetapi karena adanya pandemi Covid-19 ini, program Kartu Prakerja disesuaikan sifatnya menjadi semi-bantuan sosial. Di samping itu program ini mendapat amanat tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak Covid-19 yang belum terlindungi. Kemudian, Program Kartu Prakerja sejak tahun 2020 menjadi komponen dari program PEN pada cluster Perlindungan Sosial dengan anggaran sebesar Rp20 triliun dan target 5.600.000 peserta.

Peran Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam merespons situasi akibat pandemi Covid-19 melalui program Kartu Prakerja. Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan melalui DJPb untuk

melakukan realisasi belanja dalam rangka pembayaran Program Kartu Prakerja.

Pentingnya peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam kecepatan dan ketersampaian bantuan kepada penerima manfaat sangat terlihat mulai dari proses pembukaan Rekening Dana Kartu Prakerja digunakan untuk menampung Dana Kartu Prakerja untuk biaya pelatihan dan insentif sampai dengan penyaluran dana biaya pelatihan ke rekening platform digital untuk diteruskan kepada lembaga pelatihan, serta penyaluran dana insentif kepada para peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan dan survei.

Proses pembukaan rekening Dana Kartu Prakerja harus mendapat persetujuan Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan. Rekening yang kemudian dikelola oleh Manajemen Pelaksana dari *Project Management Officer* (PMO) ini dibuka di bank umum yang telah ditetapkan sebagai mitra pengelola Rekening Dana Kartu Prakerja. Rekening ini terdiri atas Rekening Induk untuk menampung Dana Kartu Prakerja dan Rekening Virtual untuk menampung dana penerima Kartu Prakerja.

Mekanisme penyaluran dana program Kartu Prakerja yang bersifat semi-bantuan sosial tersebut melalui proses pencairan dana yang beradaptasi dengan perkembangan pembayaran dunia perbankan yang modern dan didukung sistem teknologi informasi yang tinggi seperti Platform Digital, Lembaga Pelatihan, Bank, dan penerima manfaat.

Adapun mekanisme pembayaran biaya pelatihan kepada lembaga pelatihan dan insentif kepada peserta yang telah selesai melakukan pelatihan dan mengisi survei menggunakan Cash Management System (CMS), yaitu suatu sistem aplikasi dan informasi pelaksanaan transaksi perbankan secara online dan realtime seperti informasi saldo rekening, transfer dana antar rekening, dan fasilitas lainnya. (<https://djp.kemenkeu.go.id>, n.d.)

Proses bisnis penyaluran dana program kartu prakerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Calon peserta mendaftar melalui situs resmi Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id
2. PMO melakukan:
 - a) Verifikasi dan validasi by system yang telah terintegrasi dengan data center Dukcapil dan Dapodik.
 - b) Menetapkan SK peserta jika memenuhi syarat.
 - c) Membuka virtual account (VA) peserta.
 - d) Menerbitkan SPP/SPM berdasarkan SK peserta.

Setelah melakukan persyaratan dari *Project Management Officer* (PMO) yang dikelola oleh Manajemen:

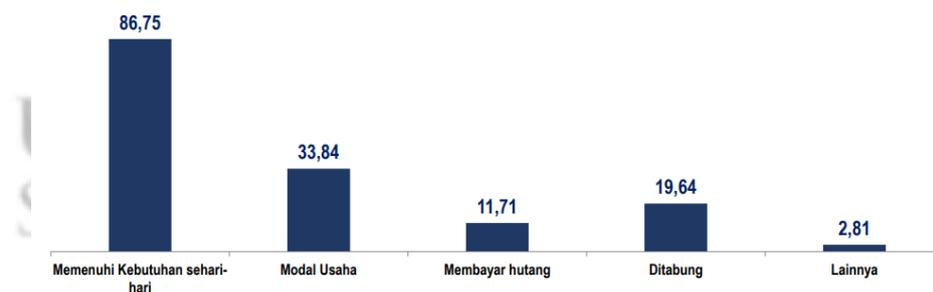
1. Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
2. Berdasarkan SPM tersebut, setelah melalui proses validasi KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

3. Berdasarkan SP2D, maka terjadi pencairan dana Kartu Prakerja dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) masuk ke VA masing-masing peserta yang ada di Rekening Dana Kartu Prakerja yang merupakan Rekening Penampungan Lainnya (RPL) yang sebelumnya telah dibuka di Bank Umum atas persetujuan Direktorat Pengelolaan Kas DJPb.
4. PMO memberikan notifikasi/pemberitahuan kepada peserta bahwa sudah dapat memilih/membeli pelatihan.
5. Peserta memilih/membeli pelatihan melalui platform digital.
6. Peserta melaksanakan pelatihan.
7. Lembaga pelatihan memberikan notifikasi kepada platform digital bahwa peserta telah menyelesaikan pelatihan.
8. Platform Digital memberi laporan /menagih biaya pelatihan kepada PMO.
9. Setelah proses maker, checker, dan approval, PMO memerintahkan Bank Umum untuk memindahbukukan biaya pelatihan dari VA peserta ke rekening platform digital.
10. Bank Umum memindah bukukan biaya pelatihan ke rekening platform digital untuk diteruskan ke lembaga pelatihan.
11. Melalui proses maker, checker, dan approval juga PMO memindahbukukan insentif (pasca pelatihan dan isi survei) dari VA ke rekening pribadi atau e-wallet peserta setelah menyelesaikan pelatihan.

Dari bagan proses bisnis penyaluran dana Kartu Prakerja tersebut terlihat peran sentral DJPb mulai dari awal proses pembentukan rekening

Dana Kartu Prakerja sampai dengan penyaluran dana ke rekening penerima manfaat, terutama peserta Kartu Prakerja. Proses yang cepat dan akurat dengan dukungan sistem aplikasi dan teknologi informasi yang tinggi mendorong realisasi belanja Kartu Prakerja dapat terserap dengan optimal pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Kelancaran proses pencairan dan penyaluran dana tersebut tentunya berdampak positif terhadap kesuksesan program Kartu Prakerja sebagai salah satu instrumen fiskal dalam kebijakan countercyclical APBN sebagai respon atas munculnya pandemi Covid-19. Dorongan konsumsi pemerintah/government spending melalui belanja yang ekspansif sekaligus terkendali untuk mengimbangi lesunya investasi, konsumsi rumah tangga, dan ekspor impor sangat penting dalam menjaga perekonomian Indonesia untuk mampu bertahan di masa pandemi. (<https://djpb.kemenkeu.go.id>, n.d.)



Sumber: Data Sakernas Februari 2022 (Badan Pusat Statistik)

Gambar 4. 6 Penggunaan Uang Saku (Insentif) Program Kartu Prakerja, Februari 2022

Pada **gambar 4.6** bisa disimpulkan bahwa penerima kartu prakerja yang lolos di Indonesia mendapatkan uang saku sebesar Rp 600.000/Bulan

(sampai 4 bulan), uang tersebut rata-rata digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang sebesar 86,75% dibandingkan dengan modal usaha yang sebesar 33,84%. Kegunaan uang saku tersebut kebanyakan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena adanya Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat yang menurun, dengan begitu pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari juga tidak bisa maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa Program Kartu Prakerja tidak efektif, karena tidak sesuai dengan tujuan awal program tersebut yaitu sebagai modal usaha dan menjadikan pendapatan sehari-hari.

Pada **Tabel 4.6** dapat disimpulkan hasil dari beberapa wawancara, peneliti tahu bahwa uang insentif Rp 600.000 selama 4 bulan dari kartu prakerja tersebut mayoritas digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebanyak 87%, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak terhadap pemasukan perekonomian masyarakat. Sedangkan uang insentif yang digunakan untuk tambahan modal hanya beberapa saja yaitu sebanyak 13%. Dengan begitu uang insentif tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Surabaya yang telah lolos mendapatkan Kartu Prakerja, tetapi masih belum bisa dikatakan efektif dalam penyaluran uang insentif tersebut.

Adapun dibawah ini tabel dari peneliti hasil wawancara peserta yang lolos dan sudah menerima uang insentif dari kartu prakerja, sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Masyarakat Sudah Lolos Kartu Prakerja Dan Juga Bentuk Penyaluran Uang Insentif Kartu

No.	Nama	Bentuk Penyaluran	Alasan
1.	Dian Ratnasari	OVO	Untuk Kebutuhan sehari-hari
2.	Nurin Niswah	BNI	Untuk kebutuhan sehari-hari
3.	Arif Sholahuddin	DANA	Untuk kebutuhan sehari-hari
4.	Munadi	BCA	Untuk tambahan modal mie ayam
5.	Sri Priharyani	BCA	Untuk kebutuhan sehari-hari
6.	M. Ach. Muhammad T	OVO	Untuk kebutuhan sehari-hari
7.	Johan Pranata	BNI	Untuk tambahan modal online shop
8.	Dian Rusniawati	DANA	Untuk kebutuhan sehari-hari
9.	Misellia	BCA	Untuk tambahan modal toko
10.	Andika	GOPAY	Untuk kebutuhan sehari-hari
11.	Monalisa	BNI	Untuk Kebutuhan sehari-hari
12.	Amak	OVO	Untuk kebutuhan sehari-hari
13.	Musyarrofah	BNI	Untuk Kebututuhan sehari-hari

Sumber: Data Peneliti hasil dari Wawancara

Dalam wawancara Pak Munadi selaku peserta yang lolos dari program kartu prakerja mengatakan bahwa:

“Selama pandemi ini mbak saya masih tetap jualan mie ayam. Yang awalnya saya jualan di kantin sekolah 17 Agustus Surabaya. Tapi karena para murid selama pandemi itu sekolahnya lewat online, maka dari itu sekolahnya otomatis di tutup mbak. Semenjak itu saya keliling daerah

rumah saya sendiri mbak. Adanya uang insentif sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan sangat membantu untuk modal saya, yah meskipun hanya 4 bulan tetapi itu sangat bermanfaat bagi saya mbak”.

Selain itu dalam wawancara Andika selaku peserta yang lolos dari program kartu prakerja mengatakan bahwa:

“Jadi setelah mengikuti tahapan-tahapan sampai mendapatkan sertifikat jadi langsung dapat uang insentif sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan. Disitu uangnya saya buat kebutuhan sehari-hari. mbaknya yah tau selama pandemi ini sulit untuk mencari pekerjaan dan juga pemasukan yah kurang sama adanya PPKM itu yang mempersempit saya untuk melamar pekerjaan di daerah Surabaya. Nah dengan adanya uang insentif tersebut itu sangat membantu kebutuhan sehari-hari saya mbak”.

Dari pernyataan beberapa narasumber menyatakan bahwa uang insentif tersebut mayoritas di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sekitar 76%. Bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, ada juga yang di gunakan untuk modal usahanya. Adanya uang insenti sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan sangat membantu bagi masyarakat yang sama-sama terkena dampak Pandemi COVID-19 di Kota Surabaya.

4.4 Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi COVID-19

Sejak bulan April 2020 hingga bulan Juni 2022, Program Kartu Prakerja telah berjalan 27 bulan dengan penerima manfaat sebesar 13 juta orang di seluruh Indonesia. Program Kartu Prakerja memberikan dampak

positif terhadap keberkerjaan, kewirausahaan, pendapatan, ketahanan pangan, ketahanan finansial, dan inklusi keuangan, termasuk bagi kelompok marjinal. Artinya, program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo tahun 2019 ini terbukti efektif menjalankan misi ganda, baik untuk meningkatkan keterampilan maupun untuk perlindungan masyarakat. Beberapa survei independen menunjukkan peserta program puas dengan pelatihan yang diambil dan puas dengan metode non-tunai dengan banyak opsi pembayaran yang digunakan di Program Kartu Prakerja.

Adapun jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja di setiap lapangan pekerjaan utamanya. Struktur lapangan pekerjaan utama di Kota Surabaya menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda antar waktu, dimana masih didominasi oleh sektor jasa, diikuti oleh sektor manufaktur dan terakhir sektor pertanian. dibawah ini tabel yang menunjukkan hasil Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Surabaya.

Tabel 4. 7 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Surabaya, 2019-2021

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	2019	2020	2021
1.	Pertanian	0,56	0,67	0,94
2.	Manufaktur	23,51	21,75	20,07
3.	Jasa	75,93	77,58	78,99
	Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Surabaya (BPS) Agus budi Santoso Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Surabaya Agustus 2021, BPS Kota Surabaya (Surabaya: BPS Surabaya, 2021).

Pada **Tabel 4.7** menunjukkan pada bulan Agustus 2021 terjadi peningkatan terhadap penduduk terjadi karena pada sektor jasa sebesar 1,41% dan sektor pertanian sebesar 0,27%, sebaliknya terjadi penurunan penduduk bekerja pada sektor manufaktur sebesar 1,68%. Kondisi ini, secara umum menggambarkan adanya pergeseran lapangan pekerjaan utama dari penduduk yang bekerja dari sektor manufaktur ke jasa. Terlihat dari semakin meningkatnya penduduk yang bekerja pada sektor jasa dan menurunnya penduduk yang bekerja pada sektor manufaktur. Hal ini diduga karena dampak covid-19 yang menyebabkan orang-orang yang kehilangan pekerjaan memutuskan untuk pindah lapangan pekerjaan, dimana sektor jasa merupakan jenis lapangan pekerjaan yang relatif tidak membutuhkan skill/keahlian yang tinggi dibanding sektor manufaktur. Selebihnya untuk sektor pertanian di daerah perkotaan sudah sewajarnya memiliki proporsi yang sangat kecil karena perubahan fungsi lahan menjadi kawasan perumahan, perkantoran ataupun industri.

Program Prakerja ini dibentuk sebagai realisasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan angka penawaran tenaga kerja yang ada sehingga menjadi solusi alternatif penurunan angka pengangguran yang ada di Kota Surabaya. Program ini menasar usia produktif yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pengalaman dan skill untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Program ini juga menunjang pemulihan ekonomi pasca terjadinya covid-19 yang menyebabkan banyak pemutusan

hubungan kerja dan ekonomi melandai turun. Program prakerja sejalan dengan program DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) yang memiliki misi yaitu meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri di Surabaya. Dalam konsep ekonomi, konsep keseimbangan tenaga kerja harus diperhatikan. selain dari sisi penawaran tenaga kerja, dari sisi permintaan diharapkan industri yang sedang mencari tenaga kerja produktif dapat dengan mudah terealisasi karena adanya program prakerja tersebut.

Tabel 4. 8 Presentase Status Pekerjaan Peserta Setelah Ikut Program Kartu Prakerja di Kota Surabaya Tahun 2022

No.	Status	Presentase
1.	Bekerja	12,78%
2.	Berwirausaha	19,17%
3.	Tidak Bekerja	68,05%
Jumlah		100%

Sumber: Data dari PPID Kemenko.

Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) yang dapat dilihat pada **Tabel 4.8**, didapati informasi bahwa tidak semua peserta program memperoleh output yaitu mendapatkan pekerjaan baru. Dari **Tabel 4.8** dapat dilihat bahwa persentase peserta program kartu pra-kerja yang lolos dan mendapatkan pekerjaan sebanyak 12.78% dan peserta program yang membuka usaha sendiri atau berwirausaha sebesar 19,17%. sedangkan persentase peserta program yang belum bekerja yaitu 68,05%, angka tersebut cukup tinggi sebagai realisasi program dalam menyerap tenaga kerja yang ada.

Berdasarkan hasil tersebut, program prakerja dikatakan tidak efektif karena jumlah output yang bekerja maupun berwirausaha kurang dari setengah peserta program yang ada, dan hal tersebut harus terus dievaluasi oleh pemerintah agar program dapat terlaksana sesuai tujuan awal pengadaan program.

Tabel 4. 9 Indikator Keefektifan Program Kartu Prakerja

No.	Keterangan	Persen
1.	Sangat Efektif	75% - 100%
2.	Efektif	50% - 76%
3.	Tidak Efektif	25% - 49%
4.	Sangat Tidak Efektif	0% - 24%

Sumber: Data Primer Olahan, 2022

Dari hasil survei dalam Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP), hingga gelombang 34 diperoleh data bahwa total peserta yang bekerja dan berwirausaha sebesar 31,95% penerima Kartu Prakerja di Kota Surabaya telah bekerja ataupun berwirausaha. Bisa dilihat pada **Tabel 3.8** Indikator Keefektifan Program Kartu Prakerja tersebut bisa disimpulkan apabila program tersebut dalam angka 25% - 49% maka tidak efektif. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwasannya Program Kartu Prakerja tidak efektif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya.

Ketidakefektifan pada program kartu prakerja dalam menyerap angkatan kerja tidak ada perubahan signifikan dalam kondisi sosial ekonomi penerima program prakerja. Khususnya dalam kasus pencarian kerja yang masih dikatakan sulit karena kurangnya kompetensi dengan latar belakang

pendidikan menengah. Sertifikat pelatihan program prakerja juga dianggap tidak cukup dalam hal mendukung kegiatan pencarian kerja. Akibat realisasi tersebut, program prakerja dinilai tidak efektif.

Dibuktikan pada angka output program untuk peserta yang bekerja atau berwirausaha hanya 31,95%, angka tersebut dianggap sedikit karena kurang dari separuh peserta. Angka Peserta yang bekerja atau berwirausaha tersebut jika dibandingkan dengan beberapa indikator efektifitas maka dikatakan tidak efektif karena berada pada range 25-40% saja, dimana program dapat dikatakan efektif jika peserta yang bekerja frekuensinya sebesar 75-100% dari total peserta pelatihan di Kota Surabaya.

Dalam penjelasan surat tanggapan dari pihak kantor pusat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Ekonomi (PPID Kemenko) itu menegaskan sekali lagi bahwasanya Program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Angkatan kerja yang dapat mendorong kebhkerjaan penerimanya ataupun berwirausaha (porgram Kartu Prakerja tidak ada jaminan kebhkerjaan, tetapi program ini ialah bantuan pelatihan untuk peningkatan skill yang diharapkan dapat mendorong kebhkerjaan penerimanya). (Limanseto, 2022)

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Program Kartu Pra-Kerja Di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi COVID-19

Pandemi Covid-19 membawa kepada perubahan kondisi manusia pada saat ini, adanya pandemi Covid-19 datang pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember kondisi ini menuai berbagai pengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat akan tetapi berdampak kepada sektor ekonomi, politik bahkan sosial. Upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus Covid-19 dilakukan dalam berbagai kebijakan yang diterapkan salah satunya adalah penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kebijakan ini tercantum dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 sebagai rangka untuk percepatan penanganan Covid-19.

Salah satu pasal yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah tersebut yakni tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 yang menjelaskan berbagai bentuk PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yakni peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan ditempat dan fasilitas umum "Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum". Demikian bunyi Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2020.

Pandemi Covid-19 akhirnya membawa sebuah realita mengenai dirumahkannya pegawai bahkan sampai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pegawai yang kemudian pada akhirnya mengakibatkan pada kondisi meningkatnya jumlah pengangguran di tengah pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (BPS) menyatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 5,23 persen pada Agustus 2019 menjadi 7,07 persen pada Agustus 2020. Jumlah pengangguran naik 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang pada Agustus lalu. Sudah ada sekitar 497 orang yang terkena PHK dan 1.594 orang yang masih dirumahkan. Dengan demikian total pekerja yang sudah tercatat mencapai 2.091 jiwa. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan peningkatan jumlah pengangguran merupakan dampak pandemi virus corona atau Covid-19. Virus telah menurunkan aktivitas industri dan menimbulkan PHK sehingga meningkatkan angka pengangguran.

Penguatan pemulihan ekonomi tersebut juga mampu untuk terus membuka lapangan kerja baru dalam penyerapan dan penambahan angkatan kerja baru serta pekerja yang sempat terkena dampak PHK di masa pandemi. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya proporsi pekerjaan formal yang mencapai 1,02% yang juga didukung oleh penyaluran belanja pemerintah yang ikut serta dalam menciptakan lapangan pekerjaan bahkan membantu memberikan subsidi modal usaha kepada masyarakat.

Dengan adanya pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk mengeluarkan program kebijakan baru, dalam rangka pengurangan angka

pengangguran. Program tersebut ialah Program Kartu Prakerja, dimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam angkatan kerja yang dapat mendorong keberkerjaan penerimanya ataupun berwirausaha.

Program Kartu Prakerja dapat dikatakan sebagai alternatif kebijakan publik seperti yang dijelaskan oleh (Rawie & Samputra, 2020), bahwa alternatif kebijakan yang memberikan manfaat besar dan biaya kecil ialah dengan pemberian pelatihan kepada para pengangguran. Dan dalam hal ini Program Kartu Prakerja yang memuat program pelatihan Sumber Daya manusia di integrasikan untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di masyarakat. Jika hanya memberikan jaminan sosial tanpa adanya pelatihan kepada pengangguran tidak serta merta meningkatkan rata-rata pendapatan nasional.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005) proses kebijakan publik terdiri dari lima tahap, yaitu:

1. Menetapkan agenda, yaitu dimana hal ini program kartu prakerja diterapkan sebagai bentuk penanggulangan pengangguran yang kian menaik akibat pandemi Covid-19.
2. Perumusan kebijakan, yaitu kebijakan berupa program kartu prakerja dibentuk berdasarkan beberapa kriteria untuk penerimanya seperti kriteria umur, status, dan lain sebagainya. Hal tersebut guna mencapai visi program kartu prakerja

3. Pembuatan kebijakan, yaitu kebijakan program kartu prakerja dibuat pada tahun 2020, sebagai tindakan pemerintah guna menekan angka pengangguran.
4. Implementasi kebijakan, yaitu program kartu prakerja direalisasikan terhadap masyarakat luas dengan tahap sosialisasi pelaksanaan dan survei.
5. Evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi oleh pemerintah mengenai program kartu prakerja dilakukan melalui kuisisioner pada laman program kartu prakerja, guna untuk mengukur output program kartu prakerja itu sendiri.

Pandemi juga membuat percepatan digitalisasi didalam setiap aspek kehidupan masyarakat seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya yang mana karena pada saat pandemi semua kontak sosial dibatasi membuat masyarakat beradaptasi kepada kemajuan teknologi dan digitalisasi sehingga menciptakan perubahan pada budaya masyarakat.

Digitalisasi merupakan salah satu faktor kunci dalam percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia karena segala informasi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara cepat, membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa lepas dari keterpurukan akibat wabah Covid-19. Digitalisasi tersebut mendorong terjadinya transformasi di berbagai aspek yang terlihat dari lonjakan penggunaan internet yang begitu besar dari penggunaan aplikasi online seperti untuk belanja, belajar, bekerja, konsultasi kesehatan, percepatan perizinan, serta penyederhanaan birokrasi dan reformasi regulasi. Namun dalam proses menuju transformasi digital

ada beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu salah satunya adalah maraknya terjadi serangan siber. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi dalam setiap langkah yang diambil pemerintah agar jalan transformasi digital dapat berjalan secara sistematis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

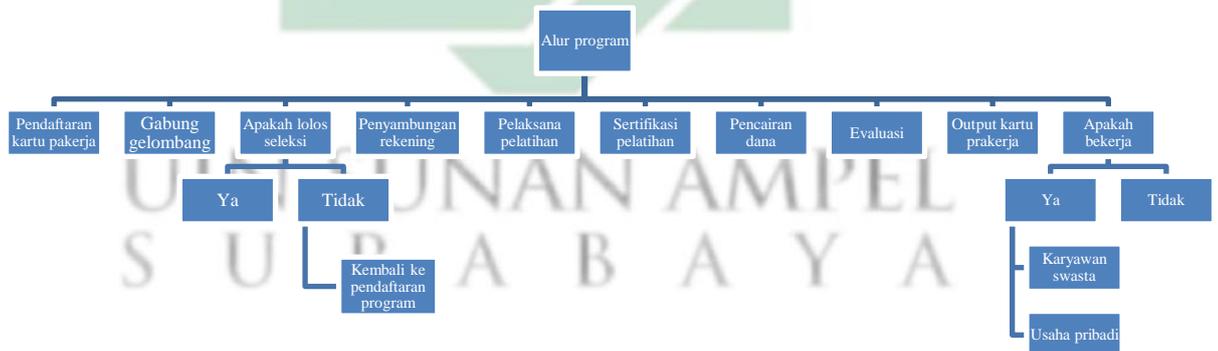
Di lapangan, Kartu Prakerja gelombang pertama dirilis 11 April 2020. Sampai awal September, total pendaftar gelombang 1-7 mencapai 18,7 juta orang. Dari jumlah itu, sudah ada 3,8 juta penerima program. 849.921 diantaranya telah menyelesaikan pelatihan pertama dan 610.563 telah menerima insentif yang dijanjikan. Sedangkan peserta program ditargetkan sebanyak 5,6 juta orang dalam skala nasional. (Fauzia, 2020)

Masyarakat kota Surabaya juga ikut berpartisipasi mendaftarkan pada Kartu Prakerja. Program kartu Prakerja bisa di sebut dengan bantuan dari pemerintah yang berfokus pada modal usaha dan ketenagakerjaan. Maka dengan begitu masyarakat bisa memanfaatkan adanya bantuan dari pemerintah yaitu dengan program kartu prakerja tersebut, untuk uang sakunya bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga bisa di buat untuk modal usaha, sedangkan pelatihan untuk peningkatan skill yang diharapkan dapat mendorong kebhkerjaan penerimanya.

Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi ker bja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang berfokus pada modal usaha dan ketenagakerjaan diitujukan untuk pencari kerja, pekerja tang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan

kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program Kartu Prakerja dijalankan melalui marketplace yang dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih dan memberi evaluasi. Program ini ialah wujud dari kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi Sumber Daya Manusia yang unggul.

Bentuk penyaluran program kartu prakerja di kota surabaya pada masa pandemi covid-19 dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya secara online, melalui website www.prakerja.go.id baik dari tahap pendaftaran peserta program, seleksi peserta, maupun tahapan pelatihan dan pencairan dana. Adapun alur pendaftaran program kartu prakerja sebagai berikut:



Sumber: Data peneliti dari Kantor Pusat PPID Kemenko

Gambar 5. 1 Alur Pendaftaran Program kartu Prakerja

Adapun tahap-tahap pendaftaran yang harus di lalui calon peserta prakerja yaitu:

- 1) Daftar akun dan login di website www.prakerja.go.id, setelah itu nanti akan diarahkan ke laman verifikasi KTP. Isi NIK, nomor KK dan tanggal lahir.
- 2) Lengkapi data diri di laman selanjutnya.
- 3) Untuk dapat melanjutkan ke verifikasi foto e-KTP, pendaftar harus mengambil foto dari handphone. Tunggu sebentar sampai sistem selesai memverifikasi foto KTP yang telah di unggah.
- 4) Langkah berikutnya ialah verifikasi dengan scan wajah. Setelah scan wajah pendaftar melanjutkan langkah berikutnya ialah verifikasi nomor handphone.
- 5) Langkah selanjutnya mengisi pernyataan pendaftar dan isi sampai selesai.
- 6) Selanjutnya pendaftar di arahkan untuk melakukan tes motivasi dan juga tes kemampuan dasar. Bisa dilihat pada **Gambar 4.2**.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Sumber: Data dari website www.prakerja.go.id

Gambar 5. 2 Form Pendaftaran Program Kartu Prakerja Melalui Website

Sedangkan untuk pelatihan ada banyak ragam jenis pelatihan yang bisa di beli dengan Kartu Prakerja, mulai dari keterampilan teknis sampai cara memulai dan membangun usaha. Pelatihan yang bisa di pilih, antara lain:

- 1) Mempelajari mekanisme perdagangan secara daring;
- 2) Mempelajari teknik Fotografi;
- 3) Meningkatkan pemahaman IT dengan pelatihan aplikasi komputer;
- 4) Memperdalam kemampuan bahasa dengan kursus;
- 5) Meningkatkan Keterampilan Perawatan dan Kecantikan,
- 6) Menjadi inspektur kebugaran;
- 7) Melakukan adaptasi dengan media sosial untuk mendapatkan penghasilan.

Setelah melakukan pelatihan melalui platform online hingga mencapai tes akhir, maka peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi dan tinggal menunggu waktu untuk pencairan dana insentif. Adapun total yang didapatkan sebesar Rp3.550.000 dengan bentuk antara lain:

- 1) biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000.
- 2) biaya Insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000/bulan selama 4 bulan.
- 3) Insentif survei keberkerjaan dengan total Rp150.000.

5.2 Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi COVID-19

Dapat dikatakan sebagai efektivitas seperti yang dijelaskan oleh (Steers, 1984;44) Efektivitas merupakan keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Tujuan awal dari program prakerja yaitu meningkatkan ketrampilan dan skill, sehingga peserta yang lolos dapat bekerja. Sedangkan fakta dilapangan mayoritas peserta, hanya termotivasi mendapatkan insentif uang saku, namun tidak mengikuti pelatihan secara maksimal.

Indikator keberhasilan program kartu prakerja berdasarkan visi dan tujuan program kartu prakerja ada lima, yaitu:

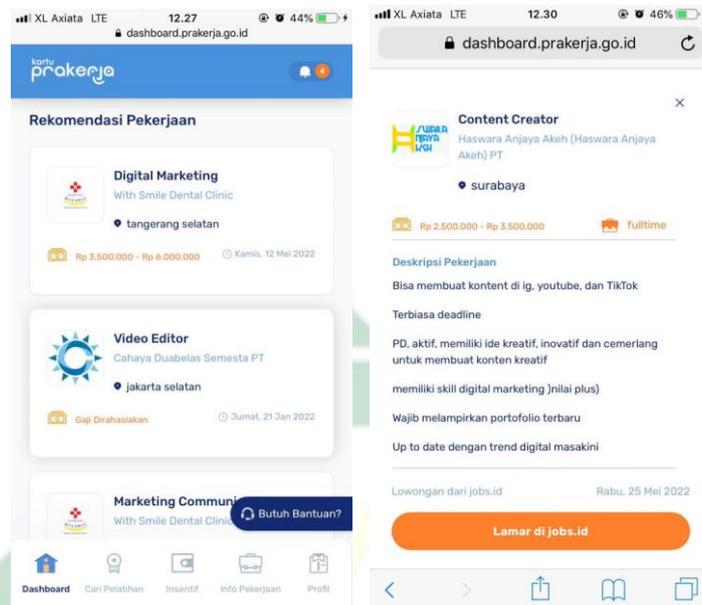
1. Seleksi peserta yang akurat, misalnya pada salah satu persyaratan program kartu prakerja yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peserta tidak dalam keadaan menempuh pendidikan, dan program ini mengutamakan orang yang terkena PHK dan juga pengangguran. Tetapi dalam penyerapan di lapangan tersebut malah sebaliknya. Maka dari itu indikator seleksi peserta yang akurat dikatakan masih tidak efektif.
2. Peningkatan keterampilan masyarakat, hasil dari wawancara dengan narasumber mayoritas yang mengikuti pelatihan pada program kartu prakerja itu menggunakan metode satu arah atau bisa juga dinamakan hanya formalitas. Misalnya peserta ketika pelatihan hanya mendengarkan pelatihannya tetapi tidak sepenuhnya memahami, sama dengan peserta tersebut tidak bisa berkembang. Dikarenakan pelatihan kartu prakerja hanya mendengarkan dan melihat vidio tetapi masih belum paham. Dengan begitu peserta yang sudah melakukan pelatihan tersebut untuk keberlanjutannya tidak ada dan peserta tidak bisa bekerja hanya dengan mengandalkan sertifikat saja, tetapi untuk skill nya harus diperhatikan. Maka bisa disimpulkan bahwa indikator peningkatan keterampilan masyarakat masih kurang efektif.
3. Peningkatan masyarakat yang bekerja. Berdasarkan hasil data pada Masyarakat Kota Surabaya yang bekerja masih menurun, walaupun ada program kartu prakerja masih tetap menurun. Bisa dilihat pada **Gambar 1.1** Agustus tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan

sebesar 0,61%, dibandingkan dengan kondisi pada Agustus tahun 2020. Dikarenakan kebanyakan dari beberapa dari narasumber pada statement, bahwa pelatihan program kartu prakerja itu hanya dianggap formalitas untuk pencairan uang. Maka bisa di simpulkan bahwa indikator peningkatan masyarakat yang bekerja masih tidak efektif.

4. Penggunaan uang insentif untuk produktivitas. Peserta program kartu prakerja yang sudah lolos tersebut mendapatkan uang insentif sebesar Rp 600.000/bulan (sampai 4 bulan), kebanyakan uang insentif tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi dan sehari-hari. Uang insentif tersebut tidak untuk digunakan penghasilan tambahan, untuk produktivitas atau meningkatkan kemampuan.
5. Faktor lain/motivasi peserta, yaitu kurangnya inisiatif masyarakat dalam mengenali teknologi masa kini, dan kurangnya masyarakat dalam membangun usaha baru. Dimana program kartu prakerja yang menjalankan pelatihan sampai selesai bukan orangnya langsung. Misalnya peserta melaksanakan pelatihan secara online itu di wakikan dan bukan pesertanya itu sendiri yang menyelesaikan pelatihan tersebut. Sehingga peserta program kartu prakerja hanya berfokus kepada pencairan insentif saja.

Peserta yang lolos dan sudah mendapatkan sertifikat di laman website prakerja peserta akan muncul rekomendasi pekerjaan, yang relevan dengan pelatihan yang di ambil. Hal tersebut agar peserta dapat terjaring

berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Berikut ini **Gambar 4.8** yang menunjukkan website prakerja untuk rekomendasi pekerjaan:



Gambar 5. 3 Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi COVID-19

Efektivitas tolak ukur Program Kartu Prakerja apabila uang yang didapatkan (uang insentif Rp 600.000) bisa digunakan untuk menghasilkan uang lagi oleh peserta Program Kartu Prakerja. Setidaknya peserta yang lolos Kartu Prakerja mendapatkan pekerjaan yang relevan. Namun peserta yang mendapatkan uang saku (insentif) mayoritas digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dibuktikan dengan pernyataan dari 13 narasumber yang lolos dan sudah menyelesaikan pelatihan sekitar 76% uang yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 24% uang yang didapatkan digunakan untuk modal dari peserta yang lolos yang sudah menyelesaikan pelatihan.

Adanya Program Kartu Prakerja juga memunculkan beberapa kendala dari narasumber.

- 1) Kurangnya inisiatif masyarakat dalam mengenali teknologi masa kini;
- 2) Kurang ketatnya sistem seleksi calon peserta Kartu Prakerja;
- 3) Kurangnya motivasi masyarakat dalam membangun usaha baru;
- 4) Ketidakefektivan program prakerja di dukung oleh pernyataan KPK mengenai aspek pelaksanaan program, bahwa ditemukan metode yang tidak memiliki mekanisme yang baik (pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta).

Jadi dapat disimpulkan bahwa presentase peserta penerima Program Kartu Prakerja di Kota Surabaya yang sudah bekerja dan berwirausaha sebesar 31,95%, artinya Program Kartu Prakerja di kota Surabaya terhadap kondisi sosial ekonomi, khususnya dalam pencarian pekerjaan, bisa dikatakan tidak terjadi perubahan yang signifikan atau bisa dibilang masih sulit karena kurangnya kompetensi yang dimiliki dengan latar belakang pendidikan menengah. Sertifikat pelatihan program prakerja juga dinilai kurang dalam mendukung aktivitas pencarian kerja. Berdasarkan hasil data penelitian tersebut maka program prakerja dikatakan tidak efektif.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Program Kartu Prakerja yang sudah berjalan masih tidak efektif dalam penyerapan tenaga kerja dengan kendala pada pemahaman program kartu prakerja di Kota Surabaya masih belum optimal, kemudian bentuk penyaluran terkait pencapaian tujuan dalam Program Kartu Prakerja, dan efektivitas Program Kartu Prakerja dalam penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada masa pandemi Covid-19 telah berdampak bagi semua sektor, salah satunya seperti sektor perekonomian, dan juga masyarakat terkena dampaknya. Pada tahun pertama pandemi tersebut, perekonomian Indonesia merosot hingga minus 2,07%. Meski begitu, kondisinya masih lebih baik daripada rata-rata perekonomian di Asia Tenggara. Kondisi perekonomian makin membaik pada 2021. Di antara negara sekawasan, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi keempat. Indonesia berhasil keluar dari resesi akibat pandemi Covid-19. Dengan begitu presiden Jokowi mengeluarkan program ialah Program Kartu Prakerja. Program kartu prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam bekerja agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Setelah itu pemerintah telah menyalurkan dana insentif sebesar Rp13,36 triliun pada tahun 2020 dan untuk tahun ini

sebesar Rp9,42 triliun juga telah disalurkan sebagaimana data tersebut sudah tercatat per Oktober 2021. Program Kartu Prakerja sangat inklusif telah menjangkau peserta pendaftar berada di 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan jumlah penerima setiap provinsi mayoritas mengalami peningkatan setiap gelombangnya. Kota Surabaya adalah kota dengan jumlah penerima tertinggi di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penerima sebanyak 401.141 orang dan yang berhasil atau yang lolos mendapatkan kartu prakerja sebanyak 126.199 orang penerima. penerima kartu prakerja yang lolos di Indonesia mendapatkan uang saku sebesar Rp 600.000/Bulan (sampai 4 bulan), uang tersebut rata-rata digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang sebesar 86,75% dibandingkan dengan modal usaha yang sebesar 33,84%. Jadi program kartu prakerja di Kota Surabaya pada masa Pandemi Covid-19 ialah sangat efektif, dikarenakan peserta program kartu prakerja meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk penyaluran program kartu prakerja masih tidak efektif, dikarenakan uang insentif tersebut mayoritas digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Efektivitas Program Kartu Prakerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya tidak efektif, Dibuktikan setelah pelatihan, persentase peserta program Kartu Prakerja yang bekerja, karena hanya mencapai 31,95%, dimana angka tersebut termasuk pada kategori tidak efektif. Dilihat dari perubahan kondisi sosial masyarakat khususnya penerima program prakerja, dimana masih banyak seleksi calon peserta tidak

akurat karena peserta yang lolos yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan untuk keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat juga masih minim pelatihan dengan satu arah, yang menjadikan kurangnya efektif dalam pelatihan. Untuk proses pencarian kerja juga dinilai sulit karena latar pendidikan yang kurang dengan pelatihan yang terbatas. Jadi dapat dikatakan bahwa program kartu prakerja tidak efektif bagi peserta program di Kota Surabaya. Pada motivasi peserta program kartu prakerja dalam pengembangan skill dinyatakan masih kurang, maka motivasi tersebut menyebabkan program kartu prakerja kurang efektif

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Saran Untuk masyarakat

Agar peserta yang lolos pada program kartu prakerja usahakan untuk segera mencari pekerjaan atau bisa membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang sudah dibuat oleh program tersebut.

2. Saran Untuk Pemerintah

Hendaknya pemerintah mengevaluasi secara tindak lanjut mengenai realisasi program kartu prakerja, khususnya lingkup kota sehingga program prakerja bisa efektif dalam mencapai visi program.

3. Sarana Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang membahas tema yang sama, dapat menggali referensi lebih dalam dan juga memperbanyak data pendukung agar hasil penelitian lebih sempurna dicapai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

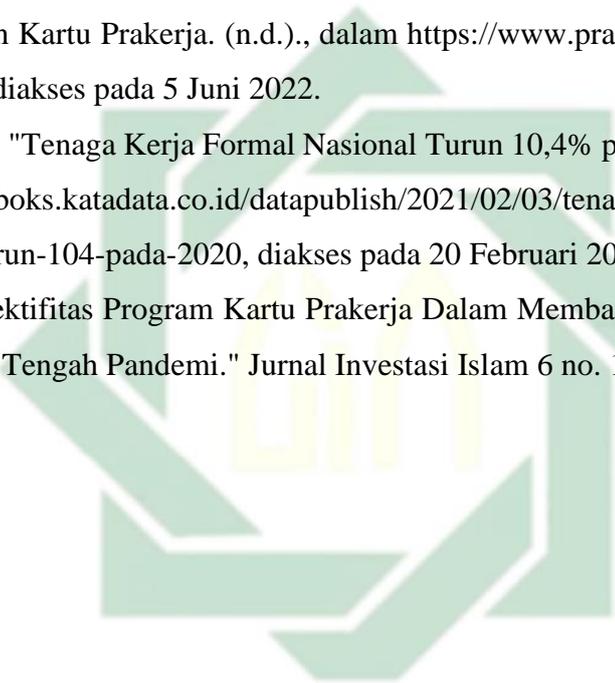
- Agustino, L. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik." Alfabeta. (2008): 7.
- Anelia Meilani L.G. "Penulisan Skripsi Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)." (2021).
- Ardi Rohmah. "Kontribusi Sektor Industri Kecil Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia" *Jurnal Ekonomi* 3 (2019).
- Awaludin, H. "Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional." (2006): 166–173.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). dalam <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>, diakses pada 7 Juni 2022.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt).", dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815>, diakses pada 2021.
- Consuello, Y. "Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19. *Buletin Hukum Dan Keadilan.*" (2020): 93–100. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479>.
- "Data Lolos Prakerja di Kota Surabaya." (2022).
- Djaman, L. S. (n.d.). "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020"
- Djaman, L. S. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020," (2019)
- DJPb (n.d.). "Dukung Misi Ganda Program Kartu Prakerja.", dalam <https://djp.b.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3887-djpb-dukung-misi-ganda-program-kartu-prakerja.html>, diakses pada 2 August 2022.
- Dumairy. "Perekonomian Indonesia." Erlangga. (1997)
- Fauzia, M. (2020). "Kartu Prakerja Gelombang 7 Ditutup, Pendaftar Capai 2,8 Juta Orang.", <https://money.kompas.com/read/2020/09/07/132451026/kartu-prakerja-gelombang-7-ditutup-pendaftar-capai-28-juta-orang>, diakses pada

2020.

- Gatiningsih dan Sutrisno, E. "Kependudukan dan ketenagakerjaan." Modul mata kuliah. (2017), <http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Bukugati>
- Handoko, T. H. "Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. (Edisi Pertama)." BPFE, (2005): 112.
- Hanifah, N. F. "Analisis penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di provinsi jawa tengah periode 1980 – 2015." (2019).
- HS, H. N. "Sistem Pendukung Keputusan Pada Penentuan Penerimaan Kartu Prakerja Menggunakan Metode Simple Additive Weighting." Universitas Bina Sarana Informatika (2020).
- Indayani, S., B. H. J. "Analisis Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19." *Ejournal.Bsi.Ac.Id* 18, no. 2. (2020), <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- Junaedi, D., dan Salistia, F. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak." *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 995–1115), (2020).
- Kartu Prakerja. (n.d.). dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim/id/data-publikasi/pub/pengumuman/2908-kartu-prakerja.html>, diakses pada 27 Mei 2022.
- Kemenko Perekonomian. "Program Kartu Prakerja." (2020), https://tenagakerja.denpasarkota.go.id/uploads/download/download_202203060316_KARTUPRAKERJA.pdf.
- Kesowo, B. "Undang - Undang RI No 13 tahun 2003." *Ketenagakerjaan*, (2003).
- Nasional Tempo.co. (n.d.). "KPK Temukan 4 Masalah Program Kartu Prakerja." dalam <https://nasional.tempo.co/read/1354994/kpk-temukan-4-masalah-program-kartu-prakerja>, diakses pada 13 September 2022.
- Limanseto, H. "Tanggapan Permohonan Informasi Publik Terkait Kartu Prakerja Agustus 2022." (2022).
- Manalu, I. Y. (2021). "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Pekanbaru."
- Mardiasmo. "Efisiensi dan Efektifitas." *ANDY* (2016): 134

- Natasya Imanuela Memah, Joyce J. Rares, G. J. W. "Efektivitas Program Kartu Prakerja Era Pandemi Covid –19 Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara" (2022): 247–254.
- Nurcholis, S. S. Direktori Industri Manufaktur Kota Surabaya, Badan Pusat Statistik. (2021),
- Panjaitan, D. V., Nunung Nuryartono, dan Lukyutawati Anggraeni. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja dalam Program Kartu Prakerja." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 10 no. 1, (2021): 20–43, <https://doi.org/10.29244/jekp.10.1.2021.20-43>.
- Peneliti Presisi (n.d.). "Kartu Prakerja Efektif Atasi Dampak Pandemi.", dalam <https://www.prakerja.go.id/artikel/peneliti-presisi-kartu-prakerja-efektif-atasi-dampak-pandemi>, diakses pada 9 Maret .2022
- Predianto, T. "Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19." (2020): 13.
- Priatna, I. K. H. "Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020." (2020): 11.
- Putri, L. M. "Pengaruh Pelatihan dan Insentif Terhadap Pengetahuan dan Serapan Tenaga Kerja Pada Penerima Kartu Prakerja Di Kota Makassar." (2021).
- Rawie, Y., & Samputra, P. L. "Analisis Cost and Effectivity Program Kartu Prakerja di Indonesia." *Journal Manajemen Dan Kebijakan Publik* 5 no. 2, (2020):118–139,
- Rosalina, I. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya*, (2012): 216.
- Rusalia, D. "Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ekonomi Dan Bisnis*, (2018).
- Sadono Sukirno. "Pengantar Teori Ekonomi Makro." Raja Grafindo. (1994): 107.
- Santoso, A. budi. "Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Surabaya Agustus 2021." BPS Kota Surabaya (Issue Januari), BPS Surabaya, (2021).
- Saraswati, P. S. "Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 14, no. 2, (2020): 147–152.

- Simamora, H. *Management Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, (2006): 141.
- Simanjatak. "Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia." LPFE, UI, (2001).
- Subarsono, A. "Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi." Pustaka Pelajar, (2005): 13.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D (pp. 30–166)." Alfabeta. (2015),
- Sugiyono, P. D. "Bagian III Metode Penelitian Kualitatif." Bandung: Alfabeta (2010): 458.
- Syarat Ketentuan Kartu Prakerja. (n.d.), dalam <https://www.prakerja.go.id/syarat-ketentuan>, diakses pada 5 Juni 2022.
- Databoks. (n.d.). "Tenaga Kerja Formal Nasional Turun 10,4% pada 2020.", dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/03/tenaga-kerja-formal-nasional-turun-104-pada-2020>, diakses pada 20 Februari 2022.
- Yana, S. D. "Efektifitas Program Kartu Prakerja Dalam Membangun Sumberdaya Manusia di Tengah Pandemi." *Jurnal Investasi Islam* 6 no. 1, (2021): 12–21.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A